

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas penyertaan-Nya penyusunan Revisi Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 dapat diselesaikan.

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat Kabupaten yang dievaluasi kembali oleh Kemenpan , bahwa untuk untuk SAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang perlu dilakukan perubahan / dilakukan revisi terhadap penyusunan RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2016-2021 disusun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang mengamanatkan bahwa setiap institusi diwajibkan menyusun Rencana Strategis , yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun. Rencana Strategis memuat sasaran, arah kebijakan. Strategi, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 dan bersifat indikatif.

Demikian Revisi Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 ini dibuat sebagai panduan dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Sintang, 2020
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SINTANG

DINAS
PERHUBUNGAN
FLORENSIUS KAHA, S.Pd. M.Si
PEMBAINA UTAMA MUDA
NIP. 19641125 199803 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN.....	10
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan	10
2.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan	21
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan	27
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan	46
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	49
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	
Dinas Perhubungan	49
3.2. Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala	
Daerah Terpilih	50
3.3. Telahaan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	54
3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup	
Strategis	60
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	65
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINTANG	67
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan	67
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	72
5.1. Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan	72
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	75
6.1 Rencana Program dan Kegiatan	75
6.2 Kegiatan dan Indikator Kinerja	82
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINTANG	99
BAB VIII PENUTUP	103



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2016-2021 disusun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang mengamanatkan bahwa setiap institusi diwajibkan menyusun Rencana Strategis, yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun. Rencana Strategis memuat sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 dan bersifat indikatif.

Transportasi merupakan salah satu mata rantai jaringan distribusi barang dan mobilitas penumpang yang berkembang sangat dinamis, disamping berperan dalam mendorong dan menunjang segala aspek kehidupan baik dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan. Pembangunan transportasi pada hakekatnya untuk



mendukung tercapainya pembangunan nasional menuju terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pembangunan bidang transportasi menjadi bagian upaya mewujudkan Kabupaten Sintang yang maju, mandiri dan sejahtera. Sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki kewenangan di bidang perhubungan, transportasi merupakan fokus perhatian utama dan harus dapat mengantisipasi berbagai masalah yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat akan transportasi maupun sarana dan prasarana penunjangnya. Dengan penyediaan sarana transportasi angkutan sudah barang tentu dapat mewujudkan transportasi yang lancar, tertib, aman dan nyaman dengan memberikan pelayanan prima kepada publik, serta dapat menjangkau daerah pedalaman, guna menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Mengingat kondisi geografis daerah yang cukup berat mengakibatkan upaya menyediakan transportasi publik yang dapat memadai dan menjangkau seluruh daerah dan lapisan masyarakat masih belum dapat maksimal dilakukan. Akses jalan belum dapat mencapai hingga ke seluruh kecamatan dan desa serta tidak terpeliharanya jalan menyebabkan angkutan sungai masih menjadi primadona masyarakat dalam bertransportasi.



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 mengacu pada dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor



- 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah



- Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2036;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang;



23. Peraturan Bupati Sintang Nomor 124 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 yaitu untuk memberikan arah pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang melalui rumusan strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang terarah, efektif, efisien, dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Wakil Bupati Sintang Tahun 2016-2021 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 adalah:

1. Menjabarkan visi, misi, agenda pembangunan dan program Bupati/Wakil Bupati Sintang sebagaimana yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021;
2. Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan antar bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang;



3. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja;

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan tentang latar Belakang , Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

Bab ini mengemukakan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang, Sumber Daya Dinas Perhubungan , kinerja pelayanan Dinas Perhubungan , Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini mengemukakan mendiskripsikan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang , telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih,, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kabupaten/Kota, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, telaahan Rencana tata ruang wilayah dan kajianlingkungan hidup serta Pnentu isu-isu Strategis.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini mengemukakan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah, Strategis dan kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini mengemukakan tentang program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang.

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini mengemukakan Indikator kinerja Dinas Perhubungan dengan kesesuaian RPJMD



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Perhubungan

2.1.1. Susunan dan Struktur Organisasi

Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang kewenangannya. Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah dibidang Perhubungan.

Dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang dan Peraturan Bupati Sintang Nomor 124 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang, maka susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan; dan
 - 2) Sub Bagian Aparatur dan Umum.
- c. Bidang Perhubungan Darat, terdiri dari:
 - 1) Seksi Lalu Lintas Jalan;
 - 2) Seksi Angkutan Jalan; dan
 - 3) Seksi Penganalisaan dan Operasional Terminal.



-
- b. Bidang Perhubungan Sungai, Danau dan Penyeberangan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan;
 - 2) Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan; dan
 - 3) Seksi Penganalisaan dan Operasional Dermaga.

 - c. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari:
 - 1) Seksi Kendaraan,Perbengkelan dan Perparkiran;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan; dan
 - 3) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor.

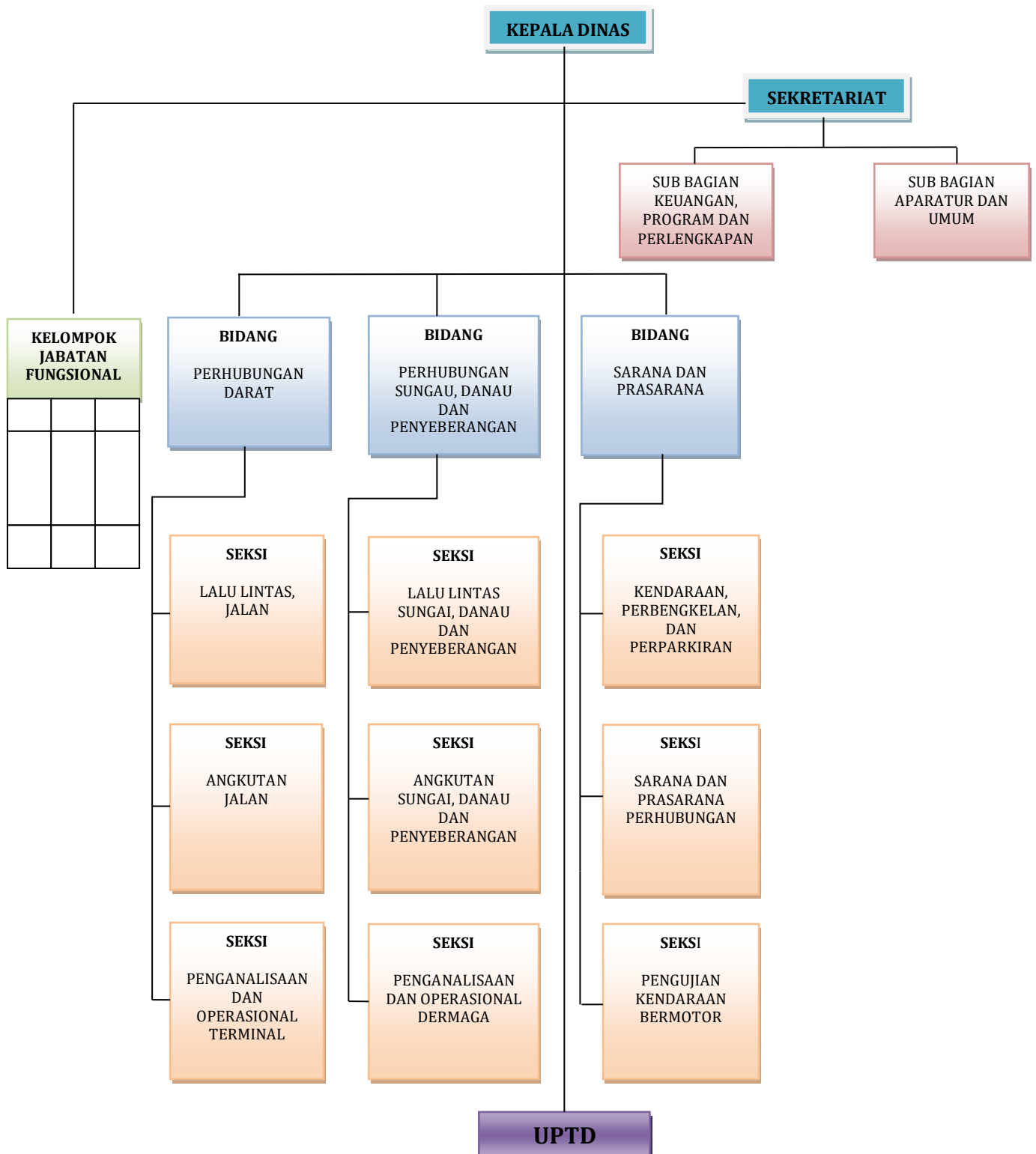
 - d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara jelas dapat dilihat pada struktur berikut :



**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINTANG**
(Berdasarkan PERDA Nomor 7 Tahun 2016/PERBUP Nomor 124
Tahun 2016)





2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 124 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang, bahwa tugas pokok Kepala Dinas Perhubungan adalah membantu Bupati dalam bidang Perhubungan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pemimpin dan pengoordinasian bidang kesekretariatan, Bidang Perhubungan Darat, Bidang Perhubungan Sungai, Danau dan Penyeberangan, dan Bidang Sarana dan Prasarana;
- b. penyusunan program kerja Dinas Perhubungan;
- c. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Perhubungan;
- d. perumusan penjabaran kebijakan dalam bidang Perhubungan;
- e. pemberian pertimbangan teknis di bidang Perhubungan;
- f. pembinaan UPTD di bidang Perhubungan;
- g. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Perhubungan;
- h. penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Bupati;
- i. penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Perhubungan;
- j. penyusunan perjanjian kinerja di bidang Perhubungan;
- k. pelaksanaan sistem pengendalian internal;



- l. penyusunan analisa jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
- m. pembinaan kegiatan administrasi, kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga di lingkungan Dinas Perhubungan;
- n. pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap staf; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris Dinas, Kepala Bidang serta masing-masing Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi. Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut:

A. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas

Tugas Pokok Sekretaris Dinas adalah membantu Kepala Dinas dalam bidang administrasi ketatausahaan, aparatur, keuangan, perlengkapan kantor, arsip dan penyusunan rencana kegiatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretris Dinas mempunyai fungsi :

- a. mengelola administrasi umum, kepegawaiaan, keuangan, arsip dan barang;
- b. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan di bidang Perhubungan;
- c. menghimpun peraturan perundang-undangan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- d. merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, kepegawaiaan, keuangan, barang dan



- memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Dinas Perhubungan;
- e. menghimpun, menyusun dan pengorganisasian program kerja dan laporan Dinas Perhubungan;
 - f. meneliti dan menelaah konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada Kepala Dinas;
 - g. melaksanakan bimbingan, mengawasi, mengevaluasi dan member petunjuk serta arahan kepada Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan dan Sub Bagian Aparatur dan Umum;
 - h. mendistribusikan dan mengoordinasikan tugas-tugas dari Kepala Dinas kepada para kepala bidang di Dinas Perhubungan;
 - i. memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas;
 - j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Ruang lingkup bidang kesekretariatan meliputi keuangan, program, perlengkapan, aparatur dan umum.

- B. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Perhubungan Darat
- Kepala Bidang Perhubungan Darat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas di bidang Perhubungan Darat.
- Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Perhubungan Darat mempunyai fungsi :
- a. Menyusun program kerja tahunan Bidang Perhubungan Darat;
 - b. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan



- bidang Perhubungan Darat;
- c. Menghimpun peraturan perundang-undangan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
 - d. Menghimpun, menyusun dan mengkoordinasikan program kerja dan laporan Bidang Perhubungan Darat;
 - e. Penyelenggaraan perencanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perhubungan darat meliputi lalu lintas jalan, angkutan jalan;
 - f. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada seksi-seksi di bidang perhubungan darat;
 - g. Mendistribusikan dan mengoordinasikan tugas dari Kepala Dinas kepada para kepala seksi;
 - h. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis lalu lintas, angkutan orang dan barang di jalan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - i. Merumuskan kebijakan teknis penetapan tarif di bidang perhubungan darat sesuai ketentuan yang berlaku;
 - J. Melaksanakan penerimaan pendapatan daerah di bidang perhubungan darat sesuai peraturan perundang-undangan;
 - k. Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program peningkatan lalu lintas jalan dan angkutan jalan serta teknik sarana dan prasarana jalan;
 - l. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi;



- m. Menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur, kriteria, perizinan, pedoman dan petunjuk operasional di bidang perhubungan darat;
- n. Perencanaan dan analisis kebutuhan rambu-rambu lalu lintas jalan, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas di jalan sesuai dengan kewenangan;
- o. Penyelenggaraan pembinaan, penyuluhan dan fasilitasi mengenai keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- p. Penyelenggaraan pengawasan dan perizinan pengangkutan orang dan barang di jalan;
- q. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang tugasnya;
- r. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Ruang lingkup bidang perhubungan darat meliputi lalu lintas jalan, angkutan jalan dan penganalisaan dan operasional terminal.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Perhubungan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Kepala Bidang Perhubungan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan pedoman teknis perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengelolaan dan pengendalian di bidang Perhubungan Sungai, Danau dan Penyeberangan.



Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Perhubungan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Perhubungan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- b. Menyusun kebijakan teknis di Bidang Perhubungan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- b. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan Bidang Perhubungan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- c. Menghimpun peraturan perundang-undangan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- d. Menyelenggarakan perencanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perhubungan Sungai, Danau dan Penyeberangan
- e. Menghimpun, menyusun dan mengkoordinasikan program kerja dan laporan bidang Perhubungan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- f. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada seksi-seksi di bidang Perhubungan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- g. Merumuskan kebijakan penetapan tarif retribusi/pendapatan daerah di bidang tugasnya;
- h. Melaksanakan penerimaan pendapatan daerah di bidang perhubungan Sungai, Danau dan Penyeberangan sesuai peraturan perundang-undangan;



- i. Perencanaan analisis kebutuhan alat pemberi isyarat dan rambu-rambu lalu lintas sungai sesuai dengan kewenangannya;
- j. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan mengenai keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan sesuai peraturan perundang-undangan;
- k. Menyelenggarakan pengawasan dan perizinan pengangkutan orang dan barang di Sungai, Danau dan Penyeberangan sesuai kewenangannya;
- l. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas;
- m. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Ruang lingkup bidang perhubungan sungai, danau dan penyeberangan meliputi lalu lintas sungai, danau dan penyeberangan, angkutan sungai, danau dan penyeberangan dan penganalisaan dan operasional dermaga.

D. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Sarana dan Prasarana

Kepala Bidang Perhubungan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas di bidang Sarana dan Prasarana.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :



- a. Menyusun Program kerja tahunan Bidang Sarana dan Prasarana;
- b. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan Bidang Sarana dan Prasarana;
- c. Menghimpun peraturan perundang-undangan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- d. Menghimpun, menyusun, dan pengoordinasian program kerja dan laporan di Bidang Sarana dan Prasarana;
- e. Menyiapkan bahan administrasi dan teknis perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan darat dan sungai meliputi terminal, halte, jembatan penyeberangan orang, pelabuhan/dermaga/stegher;
- f. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis pengujian kendaraan bermotor, perbengkelan dan perparkiran;
- g. Menyelenggarakan perencanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perparkiran, pengujian kendaraan dan perbengkelan;
- h. Melaksanakan penerimaan pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana;
- k. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana



dan prasarana perhubungan;

- l. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi;
- m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang tugasnya.
- n. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Ruang lingkup bidang perhubungan sarana dan prasarana meliputi kendaraan, perbengkelan dan perparkiran, sarana dan prasarana perhubungan dan pengujian kendaraan bermotor.

2.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan

2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Daerah

Dalam menyelenggarakan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dibutuhkan sumber daya yang memadai, agar terlaksana dengan cepat, tepat, transparan dan akuntabel, sehingga berdampak kepada kinerja suatu instansi tersebut.

Adapun sumber daya yang dimaksud adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Honorer yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kedudukan jabatan masing-masing mulai dari Pejabat Struktural, Penjabat Fungsional dan Staf.

Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang sampai dengan 31 Desember 2019 didukung oleh 44 orang Pegawai



Negeri Sipil dan 17 orang tenaga honorer sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Data PNS Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang
Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang
Tahun 2019

No.	Pangkat dan Golongan Ruang	Jumlah
1	Juru Muda/ I/a	-
2	Juru Muda Tk. I/I/b	1
3	Juru/I/c	-
4	Juru Tk. I/I/d	-
5	Pengatur Muda/II/a	7
6	Pengatur Muda Tk.I/II/b	5
7	Pengatur/II/c	11
8	Pengatur Tk. I/II/d	2
9	Penata Muda/III/a	6
10	Penata Muda Tk.I/III/b	3
11	Penata/III/c	4
12	Penata Tk.I/III/d	6
13	Pembina/IV/a	1
14	Pembina Tk.I/IV/b	1
15	Pembina Utama Muda/IV/c	1
16	Pembina Utama Madya/IV/d	-

Tabel 2.2
Data PNS Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang
Berdasarkan Pendidikan Terakhir
Tahun 2019

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah
1	SD	1
2	SLTP	-
3	SMA	19
4	D3	6
5	Starata 1	12
6	Starata 2	3



Tabel 2.3
Data PNS Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang
Berdasarkan Diklatpim Yang Diikuti
Tahun 2019

NO.	NAMA	JABATAN	DIKLATPIM YANG SUDAH DIIKUTI		
			TINGKAT IV	TINGKAT III	TINGKAT II
1.	Florensius Kaha, S.Pd.M.Si	Kepala Dinas	√	√	√
2.	Syaiful Rahman, SH	Sekretaris	√	√	-
3.	Marwan, SH, M.Si	Kabid Sarana dan Prasarana	√	-	-
4.	Barrie Danu Brata, SE, M.A	Kabid Perhubungan Sungai	√	-	-
5.	Rizal Novendry, A.Md LLAJ	Kasi Lalu Lintas Angkutan jalan dan Perparkiran	√	-	-
6.	Masturifa'I, S.Sos	Kasi Penganalisaan dan Operasional Terminal	√	-	-
7.	Agustinus, S.Sos	Kasi Penganalisaan dan Operasional Terminal	√	-	-
8.	Rina, SH. MAP	Kasubbag Keuangan, Program dan Perlengkapan	√	-	-
9.	Abibon Yub, A.Ma PKB	Kasi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-	-
10.	Catur Joko Susanto, SE	Kasi Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	-	-	-
11.	Alimsyah, S.Sos	Kasi Sarana dan Prasarana Perhubungan	-	-	-

Tabel 2.4
Data Honorer
Dishubkominfo Kabupaten Sintang Tahun 2019

No	Nama	Pendidikan	Tugas
1.	Tommy Kurniadi, SE	S1	Tenaga Teknis Lapangan pada seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan



2.	Nurmaya, SE	S1	Tenaga Teknis Lapangan pada Subbag Keuangan, Program dan Perlengkapan
3.	Dela Winda Sari Rogasiana, ST	S1	Teknis Lapangan pada Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan
4.	Eko Susanto, S.Sos	S1	Tenaga Administrasi Perkantoran pada Subbag Aparatur dan Umum
5.	Eko Priyatno	SMA	Tenaga Teknis lapangan Terminal Tj. Puri pada seksi Penganalisaan dan Operasional Terminal
6.	Mirjanudin	SMA	Tenaga Teknis Lapangan pada Seksi Lalu Lintas jalan
7.	Sudiono	SMA	Tenaga Teknis Lapangan pada Subbag Keuangan, Program dan Perlengkapan
8.	Yedi Haryadi	SMA	Tenaga Teknis Lapangan pada Seksi Kendaraan, perbengkelan dan Perparkiran
9.	Yulianus	SMA	Tenaga Teknis Lapangan pada Subbag Keuangan, Program & Perlengkapan
10.	Muhammad Nisfu Desmana Putra	SMA	Tenaga administrasi Perkantoran pada Kasubbag Aparatur dan Umum (Penjaga malam)
11.	Hardiyus	SMA	Tenaga Supir pada Subbag Aparatur dan Umum



12.	Risma Amanda Laraszati	SMA	Tenaga Administrasi Perkantoran pada Seksi Penganalisaan dan Operasional Dermaga
13.	Gema Henny Triana	SMA	Tenaga Teknis Lapangan pada Seksi Lalu Lintas Jalan
14.	Fetrus	SMP	Tenaga Kebersihan Gedung Pengujian pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor
15.	Endah Sriwinarti	SMP	Tenaga Kebersihan Kantor pada Subbag Aparatur dan Umum
16.	Tri Handoko	SMP	Tenaga Kebersihan Terminal Tj. Puri pada Seksi Penganalisaan dan Operasional Terminal
17.	Asrori	SMP	Tenaga Kebersihan Terminal Sei Durian pada Seksi Penganalisaan dan Operasional Terminal

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas diperlukan sarana dan prasarana penunjang yang memadai agar proses pencapaian tujuan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang tidak menjadi alasan tidak terlaksananya tugas pokok dan fungsi yang dibebankan. Namun sebaliknya, harus berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan dan secara terus menerus berupaya meningkatkan kekurangan tersebut.



Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang diantaranya peningkatan Fasilitas serta perbaikan gedung kantor maupun peralatan gedung kantor yang rusak, serta pengadaan peralatan gedung kantor sehingga mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang.

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang sebagai berikut:

Sampai dengan periode tahun 2019, posisi Neraca Dinas Perhubungan per 31 Desember 2019 menunjukkan keadaan aset tetap sebesar Rp. 66.968.407.584,84 .

Tabel 2.5
Neraca
Tahun 2019
Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang

No.	Uraian	Per 31 Des 2019 (Rp.)	Per 31 Des 2018 (Rp.)
1.	Tanah	2.047.107.895,78	2.047.107.895,78
2.	Peralatan dan Mesin	9.570.468.680,68	9.369.132.680,68
3.	Gedung dan Bangunan	64.982.385.447,15	61.516.976.447,15
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	16.053.727.065,75	16.004.027.065,75
5.	Aset Tetap Lainnya	249.816.250,00	249.816.250,00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	101.916.000,00	101.916.000,00
7.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(26.037.013.754,52)	(23.108.609.830,71)
Jumlah		66.968.407.584,84	66.180.366.508,68



2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Salah satu misi Dinas Perhubungan adalah menerapkan Standar Pelayanan Minimal dalam setiap program dan kegiatan yang direncanakan. Setiap hal yang dilaksanakan harus dapat menyentuh kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pelayanan maksimal dibidang transportasi adalah suatu keharusan yang perlu dijawab oleh Dinas Perhubungan sebagai sebuah tantangan.

Meningkatkan kualitas pembangunan prasarana, fasilitas dan perizinan dibidang perhubungan guna mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan potensi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perhubungan, meningkatnya pelayanan angkutan kepada masyarakat luas, penyediaan sarana dan prasarana di bidang perhubungan untuk memenuhi kebutuhan akan sarana pendukung transportasi, serta mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas di jalan raya dengan peningkatan disiplin dan ketertiban pengguna jalan serta pengamanan lalu lintas merupakan bentuk pelayanan yang akan dilakukan secara kontinue dan dievaluasi secara berkala. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan dibidang Perhubungan;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Perhubungan;
- c. pembinaan dan pengawasan UPTD di bidang Perhubungan;
- d. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan,



- kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Perhubungan;
- e. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Perhubungan;
 - f. pelaksana penyuluhan, pembinaan, dan pengawasan di bidang Perhubungan;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksana tugas dan fungsi;
 - h. penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Perhubungan;
 - h. penyusunan perjanjian kinerja di bidang Perhubungan;
 - i. penyusunan analisa jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan Dinas;
 - j. pelaksanaan sistem pengendalian internal;
 - k. pelaksanaan pembinaan teknis dan operasional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati Sintang; dan
 - l. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3.1. Pengujian Kendaraan Bermotor

Pengujian kendaraan bermotor disebut juga uji kir adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta



tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

Uji Tipe Kendaraan Bermotor adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik kendaraan bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, kereta gandengan atau kereta tempelan sebelum kendaraan bermotor dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal serta kendaraan bermotor yang dimodifikasi.

Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan, yang dioperasikan di jalan.

Pelaksanaan Pengujian kendaraan bermotor di Unit PKB dan pemeriksaan dilakukan oleh Penguji yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah, bagi kendaraan yang memenuhi kelaikan akan disahkan oleh pejabat yang ditunjuk akan diberi tanda uji.

Kabupaten Sintang memiliki 1 (satu) unit Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor yang terletak di Jalan Sintang-Pontianak KM.13 dan telah beroperasi sejak tahun 2012. Pengujian dilaksanakan secara manual dan mekanis. Terdapat 3 buah mesin pengujian kendaraan yang merupakan bantuan Kementerian Perhubungan RI. Banyaknya kendaraan yang diuji kir sebagaimana tabel berikut:



Tabel 2.6
Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji
Tahun 2016-2019
Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang

No	Jenis Kendaraan	Jumlah			
		2016	2017	2018	2019
1.	Mobil Penumpang	216	219	234	235
2.	Mobil Bus	147	147	147	147
3.	Mobil Barang	4372	4524	4783	5001
4.	Kendaraan Khusus	-	-	-	-
5.	Kereta gandengan	-	-	-	-
6.	Kereta Tempelan	-	-	-	-
	Total	4735	4890	5164	5383

Banyaknya kendaraan yang lulus uji sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.7
Jumlah Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji
Tahun 2016-2019
Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang

No	Jenis Kendaraan	Jumlah			
		2016	2017	2018	2019
1.	Mobil Penumpang	77	22	23	23
2.	Mobil Bus	6	5	6	5
3.	Mobil Barang	2184	1206	1409	1832
4.	Kendaraan Khusus	-	-	-	-
5.	Kereta gandengan	-	-	-	-
6.	Kereta Tempelan	-	-	-	-
	Total	2267	1233	1438	1865

Terkait dengan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM.71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor



133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor bahwa uji berkala perpanjangan kendaraan bermotor dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan.

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dikenai biaya yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Bupati Sintang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sintang. Biaya pengujian kendaraan bermotor sebagaimana tampak dalam tabel berikut:

Tabel 2.8
Biaya Pengujian Kendaraan Bermotor
Tahun 2016-2019
Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang

Biaya Pengujian Kendaraan Bermotor						
Jenia Pengujian			Tahun			
Pengujian Awal	Satuan	2016	2017	2018	2019	
a. JBB s.d. 2500 Kg	Rp.	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
b. JBB 2501 s.d. 7500 Kg	Rp.	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
c. JBB 7500 s.d. 14000 Kg	Rp.	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
d. JBB >14000 Kg	Rp.	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
Pengujian Berkala						
a. JBB s.d. 2500 Kg	Rp.	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
b. JBB 2501 s.d. 7500 Kg	Rp.	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
c. JBB 7500 s.d. 14000 Kg	Rp.	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
d. JBB >14000 Kg	Rp.	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
Pengujian Penghapusan						
a. Kendaraan Bermotor beroda 2 (dua)	Rp.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
b. Kendaraan Bermotor beroda 4 (empat)	Rp.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
c. Kendaraan Bermotor beroda 6 (enam)	Rp.	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
d. Kendaraan Bermotor lebih Dari 6 (enam)roda	Rp.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000



2.3.2. Pelayanan Pelabuhan Sungai/Bandar Udara/Terminal

Dermaga adalah tempat kapal ditambatkan di pelabuhan. Pada dermaga dilakukan berbagai kegiatan bongkar muat barang dan orang dari dan ke atas kapal. Pelabuhan adalah sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, atau danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Dermaga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pelabuhan.

Bandar udara atau bandara merupakan sebuah fasilitas tempat pesawat terbang dapat lepas landas dan mendarat. Bandar udara yang paling sederhana minimal memiliki sebuah landas pacu namun bandara-bandara besar biasanya dilengkapi berbagai fasilitas lain, baik untuk operator layanan penerbangan maupun bagi penggunanya. Menurut Annex 14 dari ICAO (*International Civil Aviation Organization*): Bandar udara adalah area tertentu di daratan atau perairan (termasuk bangunan, instalasi dan peralatan) yang diperuntukkan baik secara keseluruhan atau sebagian untuk kedatangan, keberangkatan dan pergerakan pesawat. Sedangkan definisi bandar udara menurut PT (Persero) Angkasa Pura adalah "lapangan udara, termasuk segala bangunan dan peralatan yang merupakan kelengkapan minimal untuk menjamin tersedianya fasilitas bagi angkutan udara untuk masyarakat".

Terminal bus adalah sebuah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan



pemberangkatan kendaraan umum. Terminal penumpang dapat dikelompokkan atas dasar tingkat penggunaan terminal kedalam 3 (tiga) tipe sebagai berikut:

a. Terminal penumpang tipe A

Terminal tipe A atau terminal induk berfungsi melayani kendaraan umum baik secara nasional maupun internasional seperti angkutan antar kota antar provinsi dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan

b. Terminal penumpang tipe B

Terminal tipe B atau terminal regional berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan.

c. Terminal penumpang tipe C

Terminal tipe C atau subterminal berfungsi melayani kendaraan umum kelas kecil seperti angkutan kota dan angkutan pedesaan.

Di Kabupaten Sintang terdapat 2 (dua) buah pelabuhan sungai yaitu Pelabuhan Sungai Durian dan Pelabuhan Sungai Ringin, 1 (satu) buah pelabuhan/bandar udara yaitu Bandar Udara Susilo dan 5 (lima) buah terminal yaitu terminal Sungai Durian, terminal Sungai Ukoi, terminal Tanjungpuri, terminal Sepauk dan terminal Nanga Mau.



Tabel 2.9
Jumlah Pelabuhan Sungai/Pelabuhan Udara/Terminal
Tahun 2016-2019
Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019
1.	Pelabuhan Sungai	3	3	3	3
2.	Pelabuhan Udara	2	2	2	2
3.	Terminal	5	5	4	3

Dalam pelaksanaannya, pelabuhan sungai, bandar udara dan terminal melayani arus orang mau pun barang yang tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 2.10
Jumlah Arus Penumpang Umum
Tahun 2016-2019
Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang

No	Uraian	2016	2017	2018	2019
1.	Penumpang Angkutan Umum	537.511	211.745	218.769	201.946

Arus penumpang angkutan umum memiliki trend menurun setiap tahunnya, hal ini disebabkan oleh meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi, kerusakan jalan yang semakin meningkat dan pengaruh cuaca yaitu seringnya terjadi banjir pada jalan-jalan yang dilalui oleh masyarakat.

Untuk melayani masyarakat dalam hal penyediaan angkutan umum, Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk menyediakan kendaraan angkutan umum namun harus



memiliki ijin trayek dari pemerintah. Jumlah trayek yang ada di Kabupaten Sintang seperti tabel berikut:

Tabel 2.11
Jumlah Trayek Angkutan Umum
Tahun 2016-2019
Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang

Uraian	Satuan	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
Trayek	Trayek	72	72	72	72

Secara rinci terdapat dalam tabel berikut:

ANGKUTAN DALAM KOTA

NO	TRAYEK	Unit	Kapasitas	
			Seat	Jumlah
1	TERMINAL SEI. DURIAN – TANJUNG PURI	22	9	198
2	TERMINAL SEI. DURIAN – BANING	10	9	90
3	TERMINAL SEI. DURIAN – SEI. PUTIH	4	9	36
4	TERMINAL TJ. PURI – TERMINAL SEI. DURIAN	4	9	36
5	TERMINAL TJ. PURI – BANING	12	9	108
6	TERMINAL TJ. PURI – JERORA	5	9	45
7	TERMINAL TJ. PURI – KP. LADANG	4	9	36
8	TERMINAL TJ. PURI – MENYURAI	4	9	36
9	TERMINAL TJ. PURI – SESAR	3	9	27
10	TERMINAL TJ. PURI – MUSEUM	1	9	9
11	TERMINAL TJ. PURI – SEI. KAWAT	1	9	9
	Jumlah	70	99	630

ANGKUTAN PEDESAAN

NO	TRAYEK	Unit	Kapasitas	
			Seat	Jumlah
	<u>Terminal Sungai Durian :</u>			
1	TERMINAL SEI. DURIAN – SUNGAI UKOI	21	9	189
2	TERMINAL SEI. DURIAN – PANDAN	19	9	171
3	TERMINAL SEI. DURIAN – DEDAI	11	9	99
4	TERMINAL SEI. DURIAN – SKP.I	17	9	153
5	TERMINAL SEI. DURIAN – BELOYANG	4	9	36



6	TERMINAL SEI. DURIAN – BAYA BETUNG	1	9	9
7	TERMINAL SEI. DURIAN – GURNG	2	9	18
8	TERMINAL SEI. DURIAN – BANCOH	2	9	18
9	TERMINAL SEI. DURIAN – LAMAN BUKIT	3	9	27
10	TERMINAL SEI. DURIAN – KAJANG	2	9	18
11	TERMINAL SEI. DURIAN – GURUNG MALI	2	9	18
12	TERMINAL SEI. DURIAN – SEI. KURA	7	9	63
13	TERMINAL SEI. DURIAN – TEMPUNAK	9	9	81
14	TERMINAL SEI. DURIAN – SKP.C / PAOH	13	9	117
15	TERMINAL SEI. DURIAN – SEPAUK	12	9	108
16	TERMINAL SEI. DURIAN – SKP. H	8	9	72
17	TERMINAL SEI. DURIAN – SEI. AYAK	2	9	18
18	TERMINAL SEI. DURIAN – MANSIK	4	9	36
19	TERMINAL SEI. DURIAN – MENSIKU	5	9	45
20	TERMINAL SEI. DURIAN – TELAGA	8	9	72
21	TERMINAL SEI. DURIAN – KELANSAM	7	9	63
22	TERMINAL SEI. DURIAN – BAUNG	5	9	45
23	TERMINAL SEI. DURIAN – SEJIRAK	1	9	9
24	TERMINAL SEI. DURIAN – TUMBUK	1	9	9
25	TERMINAL SEI. DURIAN – PEDADANG	2	9	18
26	TERMINAL SEI. DURIAN – SEMUBUK	1	9	9
27	TERMINAL SEI. DURIAN – SERANGAS	3	9	27
28	TERMINAL SEI. DURIAN – SEGANTONG	1	9	9
29	TERMINAL SEI. DURIAN – MANGKOK MATAI	1	9	9
30	TERMINAL SEI. DURIAN – BALAI SEPUAK	1	9	9
31	TERMINAL SEI. DURIAN – GANDIS HILIR	1	9	9
32	TERMINAL SEI. DURIAN – KEDERAS	1	9	9
	Jumlah	177	288	1593

NO	TRAYEK	Unit	Kapasitas	
			Seat	Jumlah
1	SINTANG – SERAWAI	5	25	125
2	SINTANG – NANGA KETUNGAU	0	25	0
3	SINTANG – MERAKAI	3	25	75
4	SINTANG – SENANING	1	25	25
	Jumlah	9	100	225

NO	TRAYEK	Unit	Kapasitas	
			Seat	Jumlah
	<u>Terminal Tanjung Puri :</u>			
1	TERMINAL TANJUNG PURI – SEI. UKOI	4	9	36
2	TERMINAL TANJUNG PURI – L. KELAM	7	9	63
3	TERMINAL TANJUNG PURI – EMPACI	5	9	45
4	TERMINAL TANJUNG PURI – SKP.G 123	6	9	54
5	TERMINAL TANJUNG PURI - SKP.G 456	3	9	27
6	TERMINAL TANJUNG PURI – JETAK	7	9	63



7	TERMINAL TANJUNG PURI – PENGKADAN	3	9	27
8	TERMINAL TANJUNG PURI – DEDAI	4	9	36
9	TERMINAL TANJUNG PURI – BULUH MERINDU	6	9	54
10	TERMINAL TANJUNG PURI – BARAS UMIN	6	9	54
11	TERMINAL TANJUNG PURI – GANDIS	3	9	27
12	TERMINAL TANJUNG PURI – SP. 7.8 BENGKUANG	3	9	27
13	TERMINAL TANJUNG PURI – NANGA TIKAN	5	9	45
14	TERMINAL TANJUNG PURI – MEKINGKAT	3	9	27
15	TERMINAL TANJUNG PURI – LINGGAM IPOH	1	9	9
16	TERMINAL TANJUNG PURI – TUGUG	1	9	9
17	TERMINAL TANJUNG PURI – NANGA MAU	6	16	96
18	TERMINAL TANJUNG PURI – NANGA TEBIDAH	5	25	125
19	TERMINAL TANJUNG PURI – SP. SILAT	4	9	36
Jumlah		82	194	860

AKDP

NO	TRAYEK	Unit	Kapasitas	
			Seat	Jumlah
1.	SINTANG – PONTIANAK	4	40	160
	1. PRIM.642 KAPUAS 2. CV. ARYO	3	40	120
2.	SINTANG – PUTUSSIBAU CV. INDAH UTAMA	2	25	50
3.	SINTANG – NANGA PINOH PT. DUTA	4	16	64
4.	SINTANG – BONGKONG CV. INDAH UTAMA	2	16	32
5.	SINTANG – JONGKONG 1. CV. ASRI	2	25	50
6.	SINTANG – SUHAID 1. CV. INDAH UTAMA	4	16	64
Jumlah		21	178	540

JUMLAH ANGKUTAN UMUM DI KABUPATEN SINTANG

NO	TRAYEK	Unit	Kapasitas	
			Seat	Jumlah
1.	ANGKUTAN DALAM KOTA	70	99	630
2.	ANGKUTAN PEDESAAN	269	591	2687
3.	AKDP	21	178	540
Jumlah		360	868	3857

**ANGKUTAN PEDESAAN**

NO	TRAYEK	Unit	Kapabilitas	
			Seat	Jumlah
	<u>Terminal Sungai Durian :</u>			
1	TERMINAL SEI. DURIAN – SUNGAI UKOI	21	9	189
2	TERMINAL SEI. DURIAN – PANDAN	19	9	171
3	TERMINAL SEI. DURIAN – DEDAI	11	9	99
4	TERMINAL SEI. DURIAN – SKP.I	17	9	153
5	TERMINAL SEI. DURIAN – BELOYANG	4	9	36
6	TERMINAL SEI. DURIAN – BAYA BETUNG	1	9	9
7	TERMINAL SEI. DURIAN – GURNG	2	9	18
8	TERMINAL SEI. DURIAN – BANCOH	2	9	18
9	TERMINAL SEI. DURIAN – LAMAN BUKIT	3	9	27
10	TERMINAL SEI. DURIAN – KAJANG	2	9	18
11	TERMINAL SEI. DURIAN – GURUNG MALI	2	9	18
12	TERMINAL SEI. DURIAN – SEI. KURA	7	9	63
13	TERMINAL SEI. DURIAN – TEMPUNAK	9	9	81
14	TERMINAL SEI. DURIAN – SKP.C / PAOH	13	9	117
15	TERMINAL SEI. DURIAN – SEPAUK	12	9	108
16	TERMINAL SEI. DURIAN – SKP. H	8	9	72
17	TERMINAL SEI. DURIAN – SEI. AYAK	2	9	18
18	TERMINAL SEI. DURIAN – MANSIK	4	9	36
19	TERMINAL SEI. DURIAN – MENSIKU	5	9	45
20	TERMINAL SEI. DURIAN – TELAGA	8	9	72
21	TERMINAL SEI. DURIAN – KELANSAM	7	9	63
22	TERMINAL SEI. DURIAN – BAUNG	5	9	45
23	TERMINAL SEI. DURIAN – SEJIRAK	1	9	9
24	TERMINAL SEI. DURIAN – TUMBUK	1	9	9
25	TERMINAL SEI. DURIAN – PEDADANG	2	9	18
26	TERMINAL SEI. DURIAN – SEMUBUK	1	9	9
27	TERMINAL SEI. DURIAN – SERANGAS	3	9	27
28	TERMINAL SEI. DURIAN – SEGANTONG	1	9	9
29	TERMINAL SEI. DURIAN – MANGKOK MATAI	1	9	9
30	TERMINAL SEI. DURIAN – BALAI SEPUAK	1	9	9
31	TERMINAL SEI. DURIAN – GANDIS HILIR	1	9	9
32	TERMINAL SEI. DURIAN – KEDERAS	1	9	9
	Jumlah	177	288	1593

NO	TRAYEK	Unit	Kapabilitas	
			Seat	Jumlah
1	SINTANG – SERAWAI	5	25	125
2	SINTANG – NANGA KETUNGAU	0	25	0
3	SINTANG – MERAKAI	3	25	75
4	SINTANG – SENANING	1	25	25
	Jumlah	9	100	225



NO	TRAYEK	Unit	Kapasitas	
			Seat	Jumlah
	<u>Terminal Tanjung Puri :</u>			
1	TERMINAL TANJUNG PURI – SEI. UKOI	4	9	36
2	TERMINAL TANJUNG PURI – L. KELAM	7	9	63
3	TERMINAL TANJUNG PURI – EMPACI	5	9	45
4	TERMINAL TANJUNG PURI – SKP.G 123	6	9	54
5	TERMINAL TANJUNG PURI – SKP.G 456	3	9	27
6	TERMINAL TANJUNG PURI – JETAK	7	9	63
7	TERMINAL TANJUNG PURI – PENGKADAN	3	9	27
8	TERMINAL TANJUNG PURI – DEDAI	4	9	36
9	TERMINAL TANJUNG PURI – BULUH MERINDU	6	9	54
10	TERMINAL TANJUNG PURI – BARAS UMIN	6	9	54
11	TERMINAL TANJUNG PURI – GANDIS	3	9	27
12	TERMINAL TANJUNG PURI – SP. 7.8 BENGKUANG	3	9	27
13	TERMINAL TANJUNG PURI – NANGA TIKAN	5	9	45
14	TERMINAL TANJUNG PURI – MEKINGKAT	3	9	27
15	TERMINAL TANJUNG PURI – LINGGAM IPOH	1	9	9
16	TERMINAL TANJUNG PURI – TUGUG	1	9	9
17	TERMINAL TANJUNG PURI – NANGA MAU	6	16	96
18	TERMINAL TANJUNG PURI – NANGA TEBIDAH	5	25	125
19	TERMINAL TANJUNG PURI – SP. SILAT	4	9	36
	Jumlah	82	194	860

AKDP

NO	TRAYEK	Unit	Kapasitas	
			Seat	Jumlah
1.	SINTANG – PONTIANAK	4	40	160
	1. PRIM.642 KAPUAS 2. CV. ARYO	3	40	120
2.	SINTANG – PUTUSSIBAU CV. INDAH UTAMA	2	25	50
3.	SINTANG – NANGA PINOH PT. DUTA	4	16	64
4.	SINTANG – BONGKONG CV. INDAH UTAMA	2	16	32
5.	SINTANG – JONGKONG 1. CV. ASRI	2	25	50
6.	SINTANG – SUHAID 1. CV. INDAH UTAMA	4	16	64
	Jumlah	21	178	540



JUMLAH ANGKUTAN UMUM DI KABUPATEN SINTANG

NO	TRAYEK	Unit	Kapasitas	
			Seat	Jumlah
1.	ANGKUTAN DALAM KOTA	70	99	630
2.	ANGKUTAN PEDESAAN	269	591	2687
3.	AKDP	21	178	540
	Jumlah	360	868	3857

2.3.3. Keselamatan Lalu Lintas

Dalam rangka menciptakan keselamatan lalu lintas, Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan kegiatan pengadaan rambu-rambu lalu lintas. Kebutuhan rambu lalu lintas di Kabupaten Sintang adalah 1999 unit. Rasio pemasangan rambu lalu lintas tampak dalam tabel berikut:

Tabel 2.12
Rasio Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas
Tahun 2016-2019
Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang

Uraian	Satuan	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
Rasio pemasangan rambu-rambu lalu lintas	%	59,92	-	-	64,37

Terdapat kenaikan rasio pemasangan rambu-rambu lalu lintas pada tiap tahunnya, sebanding dengan pendanaan yang tersedia. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Keselamatan Transportasi Darat yang



nilainya cenderung meningkat tiap tahunnya. Sampai dengan tahun 2019 telah terpasang 800 unit rambu-rambu lalu lintas dan sebanyak 402 unit rambu rambu lalu lintas yang merupakan penggantian daripada rambu-rambu lintas yang telah hilang/rusak.t.

2.3.4. Capaian Kinerja Pelayanan Tahun 2016-2019

Capaian pembangunan perhubungan selama tahun 2016-2019 yang merupakan penjabaran Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2016-2021, meliputi pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat, sungai, udara, pengembangan sumber daya manusia, penyusunan peraturan perundang-undangan dan ketatalaksanaan, dengan hasil capaian sebagai berikut:

1.1.1. Capaian Pembangunan Sarana dan Prasarana

a. Transportasi Darat

Dalam rangka peningkatan keselamatan, pelayanan dan peningkatan kapasitas serta aksesibilitas transportasi darat telah dilakukan kegiatan pengadaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, pagar pengaman jalan, rehabilitasi fasilitas terminal, pembangunan ATCS, dan pembangunan halte, pembangunan dan penataan tempat parkir serta peningkatan gedung Pengujian Kendaraan Bermotor. Rincian pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat sebagaimana tabel berikut:



Tabel 2.13
Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat
Tahun 2016-2019
Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang

No.	Kegiatan	Satuan	Pencapaian Pertahun			
			2016	2017	2018	2019
1.	Pembangunan/Pemeliharaan Halte Bus, Taxi, Gedung Terminal	Unit	1	3		
2.	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Unit				
3.	Pengadaan Marka Jalan	M2				
4.	Pembangunan Jalan masuk Bandara Tebelian	Jalan	1			
5.	Pembangunan Pagar Jalan masuk Bandara Tebelian	Pagar	1			
6.	Pembangunan Gapura Jalan masuk Bandara	Gapura	1			
7.	Penataan Lokasi Parkir dihalte Kelam Permai					1

b. Transportasi Sungai

Capaian pembangunan transportasi sungai selama tahun 2016-2019 dilakukan melalui kegiatan rehabilitasi /pemeliharaan terminal/pelabuhan, pembangunan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan, pengadaan fasilitas kelengkapan dermaga/pelabuhan dan pengadaan rambu-rambu lalu lintas sebagaimana yang tampak pada tabel berikut:



Tabel 2.14
Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi Sungai
Tahun 2016-2019
Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang

No.	Kegiatan	Satuan	Pencapaian Pertahun			
			2016	2017	2018	2019
1.	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	Sungai			1	
2.	Pembangunan/pemeliharaan terminal angkutan sungai, danau dan penyebrangan	Unit	14	19	13	13
3.	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Unit				
4.	Pembangunan Dermaga di Desa Lunjang Tingang	Unit				1

c. Capaian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam kurun waktu 2016-2019 Dinas Perhubungan telah menyelesaikan beberapa peraturan perundangan yang berupa Peraturan Bupati dan Keputusan Kepala Dinas yang mengatur beberapa substansi pekerjaan. Rincian capaian penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.16
Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
Tahun 2016-2019
Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang

Capaian	Pencapaian				Jumlah
	2016	2017	2018	2019	
Jumlah peraturan perundang undangan di sector transportasi yang ditetapkan :					
1. Peraturan Bupati	3	4	-	3	10
2. Keputusan Kepala Dinas	2	-	-	-	2



Dalam jangka waktu tahun 2016-2019 telah dilaksanakan kegiatan pembangunan berdasarkan program-program strategis untuk mencapai visi dan misi pembangunan bidang Perhubungan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Adapun sasaran strategis serta program yang dilaksanakan pada kurun waktu 2016-2019 sebagaimana berikut:

1. Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal, yang dicapai melalui pelaksanaan program:
 - a. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
 - b. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
 - c. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Pengujian Kendaraan bermotor
2. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah yang dicapai melalui pelaksanaan program:
 - a. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
 - b. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
 - c. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
3. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi *backlog* dan *bottleneck* kapasitas infrastruktur transportasi yang dicapai melalui pelaksanaan program:



- a. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
 - b. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
 - c. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
4. Peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi yang dicapai melalui pelaksanaan program:
- a. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2.3.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang, sumber pembiayaan diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 2.17
Alokasi dan Realisasi Anggaran
Tahun 2019
Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang

Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			Jumlah realisasi (Rp)	%
	Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal		
12.646.395.032,00	4.086.469.782,00	3.925.727.250,00	4.634.196.000,00	10.905.172.848,00	86,23



Dinas Perhubungan merupakan salah satu SKPD yang mengelola Pendapatan Asli Daerah. Objek pendapatan daerah dari sektor perhubungan adalah retribusi parkir, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi terminal, retribusi kepelabuhanan dan retribusi izin trayek. Terdapat trend kenaikan target dan realisasi setiap tahunnya, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.18
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2016-2019
Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang

No.	Tahun	Target	Realisasi	%
1.	2016	1.742.083.720,00	665.097.000,00	38,18
2.	2017	620.863.000,00	364.715.000,00	58,74
3.	2018	510.357.100,00	322.881.700,00	63,27
4.	2019	593.855.100,00	312.861.700,00	52,68

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan

2.4.1. Tantangan dan Peluang Pelayanan Perhubungan

2.4.1.1. Tantangan Pelayanan Perhubungan

1. Kabupaten Sintang merupakan daerah dengan kondisi geografis cukup berat, luas jangkauannya dan kondisi jalan dengan kondisi baik masih rendah dan sebagian besar permukaan berupa jalan tanah. Selain itu daya dukung jalan rendah dan rentang akses jalan darat yang masih pendek mengakibatkan pelayanan bidang perhubungan tidak maksimal.



2. Tingkat kecukupan sarana dan prasarana transportasi masih kurang dalam rangka menciptakan transportasi yang aman, lancar, murah dan murah.
3. Pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi dianggap belum optimal disebabkan keterbatasan personil dan lebih pada aspek keterbatasan kapasitas sumber daya manusia.

Apabila dilihat dari aspek penegakan hukum dalam pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi, saat ini masih tingginya tingkat toleransi aparaturnya dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.

4. Berbagai kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam bidang perhubungan belum dapat dilaksanakan karena terbentur dasar hukum pelaksanaannya.
5. Minimnya kualitas dan kuantitas SDM transportasi sesuai kompetensi standar keselamatan dan keamanan transportasi.
6. Belum optimalnya pengelolaan potensi sehingga jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah kurang maksimal.

2.4.1.2. Peluang Pelayanan Perhubungan

1. Misi pemerintah daerah yang akan mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah.



2. Dukungan kebijakan ekonomi, politik, sosial dan keamanan dari Pemerintah Pusat dapat mendukung pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang.
3. Akses ke daerah pelosok yang semakin terbuka dengan adanya kebijakan pimpinan daerah untuk membangun dari desa ke kota.
4. Adanya penetapan kawasan strategis kabupaten/kota yaitu wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial budaya dan/atau lingkungan.
5. Adanya potensi retribusi yang belum tergali dengan maksimal seperti kepelabuhanan, perparkiran.
6. Semakin berkembangnya teknologi informasi dan telekomunikasi berdampak dengan semakin mudahnya untuk mengakses informasi untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pembangunan.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah dibidang Perhubungan. Namun hal tersebut berjalan searah dengan permasalahan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang yaitu sebagai berikut:

1. Sarana perhubungan untuk mendukung terwujudnya tujuan dalam rencana tata ruang masih belum optimal.
2. Penyediaan bahan kebijakan teknis berupa dokumen perencanaan umum bidang transportasi dan pemutakhiran data lalu lintas belum diwujudkan dengan optimal.
3. Jumlah angkutan umum di kota Sintang semakin berkurang karena berkurangnya minat pengguna angkutan umum dan menjamurnya kendaraan pribadi.
4. Lemahnya data base berkaitan dengan kebutuhan dan data mengenai kondisi fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu, marka dan guardraill serta fasilitas lain seperti traffic light dan CCTV.
5. Personil / SDM yang dimiliki masih belum memiliki kompetensi khusus yang berkaitan dengan bidang



- terminal, pengujian kendaraan bermotor, MRLL, evaluasi andalalin dan pengelolaan perparkiran.
6. Masih kurangnya penataan dan pemanfaatan sarana prasarana perhubungan yang sudah tersedia untuk menggali potensi pendapatan daerah.
 7. Kurang optimalnya pengawasan dan sosialisasi /pembinaan kepada masyarakat berkenaan dengan standar keselamatan, peraturan lalu lintas, terminal dan perparkiran.
 8. Terbatasnya alokasi pagu anggaran Dinas Perhubungan menyulitkan proses penganggaran untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

3.2. Telahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. Visi Kabupaten Sintang

Perencanaan pembangunan Kabupaten Sintang dirumuskan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Sintang, serta sesuai dengan dinamika perkembangan yang terjadi. Maka berdasarkan hal tersebut, dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah telah ditetapkan visi pembangunan Kabupaten Sintang 2016-2021 yang merupakan kondisi yang ingin dicapai 5 (lima) tahun ke depan. Visi pembangunan tersebut adalah :



“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius, dan Sejahtera Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pada Tahun 2021”

Penjelasan dari Visi ini sebagai berikut:

- a. Cerdas adalah keadaan dimana masyarakat memiliki keunggulan intelektual yang berdaya saing tinggi, berperadaban, profesional serta berwawasankedepan yang luas sehingga mau dan mampu berperan secara optimal dalam kehidupan sosial.
- b. Sehat adalah keadaan dimana kondisi masyarakat, baik jasmaniah maupun rohaniah, dalam keadaan baik, dalam arti memiliki daya tahan hidup yang tinggi.
- c. Maju adalah keadaan dimana masyarakat memiliki kondisi fisik dan non fisik yang unggul, mandiri, dan berwawasan kedepan luas dengan pemanfaatan segenap potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan, yang dilandasi kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan tata ruang.
- d. Religius adalah keadaan dimana masyarakatmenghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur agama yang dianutnya.
- e. Sejahtera adalah keadaan dimana kebutuhan masyarakat terpenuhi secara optimal, adil dan merata.
- f. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih adalah keadaan dimana pemerintah daerah menerapkan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam



penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga terwujud pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, jujur dan bertanggungjawab.

3.2.2. Misi Kabupaten Sintang

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka telah ditetapkan 6 (enam) misi yang merupakan penjabaran dari visi. Misi pembangunan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal.
- b. Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil, dan terjangkau bagi masyarakat.
- c. Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah.
- d. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial.
- e. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- f. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

3.2.3. Program Pembangunan Kabupaten Sintang

Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 telah menetapkan visi dan misi untuk



menuntun arah pembangunan kearah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Sesuai dengan kewenangan yang diberikan, untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Sintang maka Dinas Perhubungan melaksanakan misi ketiga yaitu **“Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah”**.

Misi ketiga ini diterjemahkan bahwa penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas merupakan salah satu cara untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Sintang yang maju yaitu suatu keadaan dimana kebutuhan masyarakat memiliki kondisi fisik dan non fisik yang unggul, mandiri, dan berwawasan kedepan luas dengan pemanfaatan segenap potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan, yang dilandasi kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan tata ruang.

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan Pemerintah kabupaten Sintang, ditetapkanlah program-program jangka menengah yang akan direalisasikan dalam kurun waktu 2016-2021. Secara lebih jelas digambarkan dalam tabel berikut:



Tabel 3.1
Telaahan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Sintang
Tahun 2016-2021
Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang

MISI	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensiekonomi dan sumber daya daerah	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur	Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan orang	Pengembangan sarana dan prasarana perhubungan (darat, udara dan sungai) dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang, barang dan jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 2. Peningkatan Pelayanan Angkutan 3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 4. Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 5. Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Presiden Joko Widodo menetapkan Visi dan Misi Pembangunan Tahun 2015-2019 yang secara politik menjadi bagian dari tujuan tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Adapun visi pembangunan tahun 2015-2019 adalah:

“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”



Secara umum Rencana Strategis Kementerian Perhubungan memuat keseluruhan kebijakan publik di lingkungan Kementerian Perhubungan dan secara khusus membahas kebijakan publik sektor perhubungan yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun berdasarkan alokasi kebutuhan pendanaan yang tertampung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, berdimensi kewilayahan (per pulau) dan telah menyesuaikan dengan Restrukturisasi dan Reformasi Program dan Kegiatan Pembangunan.

Berdasarkan Renstra tersebut ditetapkanlah Visi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yaitu:

**“Terwujudnya Pelayanan Transportasi Yang Handal,
Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah”**

Penjelasan Visi ini adalah:

- a. Pelayanan transportasi yang handal, diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang aman (security), selamat (safety), nyaman (comfortable), tepat waktu (punctuality), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- b. Pelayanan transportasi yang berdaya saing diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang efisien, dengan harga terjangkau (affordability) oleh semua lapisan



- masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif.
- c. Pelayanan transportasi yang memberikan nilai tambah, diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong pertumbuhan produksi nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya peran serta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar yang masih menjadi tanggungjawab pemerintah.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, dirumuskan Misi Kementerian Perhubungan yaitu :

1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi.
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah.

Visi dan Misi Presiden dijabarkan menjadi sasaran pembangunan nasional transportasi yang tertuang dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yaitu:

1. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda untuk mengurangi backlog dan bottleneck kapasitas prasarana transportasi dan sarana transportasi



- antarmoda dan antarpulau sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda.
2. Meningkatnya kinerja pelayanan dan industri transportasi nasional untuk mendukung konektivitas nasional, Sistem Logistik Nasional (Sislognas) dan konektivitas global.
 3. Meningkatnya tingkat keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pelayanan transportasi.
 4. Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) disektor transportasi.
 5. Tersedianya layanan transportasi serta komunikasi dan informatika di perdesaan, perbatasan negara, pulau terluar, dan wilayah non komersial lainnya.
 6. Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan.
 7. Meningkatkan kinerja lalu lintas jalan perkotaan.
 8. Meningkatkan aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan.

Sesuai rumusan sasaran nasional pembangunan sektor transportasi dalam RPJMN Tahun 2015-2019 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan tahun 2010-2014, maka sasaran pembangunan transportasi dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dijabarkan dalam 3 (tiga) aspek yaitu keselamatan dan keamanan; pelayanan transportasi; dan kapasitas transportasi sesuai tugas dan tupoksi Kementerian



Perhubungan untuk mewujudkan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.

Adapun target kinerja Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Tahun 2015-2019 adalah:

1. Keselamatan dan keamanan transportasi
2. Pelayanan transportasi
3. Kapasitas transportasi

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat

Sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Propinsi Kalimantan Barat, maka Visi dari Dinas Perhubungan adalah :

“ Terwujudnya Pelayanan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika Yang Tertib, Teratur, Selamat, Aman, Nyaman dan Harga Yang Wajar ”.

Agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik dan dengan harapan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui peran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Propinsi Kalimantan Barat, maka Visi tersebut dituangkan kedalam Misi.

Adapun Misi dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Propinsi Kalimantan Barat, adalah sebagai berikut :



1. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana Transportasi, Komunikasi dan Informatika dengan melibatkan pihak lain.
2. Membuka keterisolasian daerah pedalaman dan daerah terpencil.
3. Memberdayakan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan akan jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika.
4. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang bermutu, kreatif dan produktif.
5. Memperluas penyebaran produk sektor unggulan dan sektor lain di Propinsi Kalimantan Barat.
6. Mewujudkan masyarakat pengguna jasa transportasi, Komunikasi dan Informatika yang berdisiplin.

Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Propinsi Kalimantan Barat, beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak di bidang Kominfo, yaitu :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
3. Meningkatkan SDM di bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika.



3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana struktur tata ruang Kabupaten Sintang disusun dengan mengakomodasi rencana struktur ruang nasional, rencana struktur ruang wilayah provinsi, serta dilengkapi dengan konsep sistem pusat kegiatan untuk Kabupaten Sintang. Pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Sintang merupakan simul pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan/atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten, yang terdiri atas:

1. PKSN (Pusat Kegiatan Strategis Nasional) terdapat di desa Jasa kecamatan Ketungau Hulu yang merupakan kawasan perbatasan Indonesia dengan Malaysia.
2. PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) terdapat di kota Sintang yang merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan kabupaten sekitar. PKW adalah kota/kecamatan yang mempunyai tingkat perkembangan lebih tinggi dan diprioritaskan untuk dikembangkan sebagai pusat pelayanan tingkat kabupaten dan beberapa kabupaten sekitarnya.
3. PKL (Pusat Kegiatan Lokal) terdapat di Nanga merakai, Nanga Sepauk dan Nanga Serawai. Penetapan PKL didasari oleh pertimbangan perlunya pusat-pusat permukiman yang tersebar secara proporsional di dalam ruang.
4. PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) terdapat di 10 ibukota kecamatan lainnya yaitu Senaning, Nanga Ketungau,



Binjai, Nanga Tempunak, Sungai Ukoi, Nanga Dedai, Kebong, Nanga mau, Nanga Tebidah dan nanga Kemangai. PPK merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

Rencana pengembangan sistem transportasi Kabupaten Sintang secara umum terdiri dari tiga aspek yaitu rencana penetapan fungsi jaringan transportasi, rencana pembangunan prasarana transportasi, dan rencana pengembangan sistem angkutan umum. Pengembangan sistem transportasi ini terutama sistem transportasi darat memiliki fungsi ganda yaitu untuk melayani perkembangan kota yang terjadi saat ini dan merangsang perkembangan kota kearah yang diinginkan dalam rencana peruntukan lahan.

Dalam konteks regional, pengembangan sistem transportasi diarahkan dengan fungsi yang telah ditetapkan baik sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan umum tingkat kecamatan, sebagai pusat pengumpulan dan distribusi barang dari dan ke wilayah kecamatan maupun sebagai pusat komunikasi. Sedangkan dalam konteks internal kota, pengembangan sistem transportasi kota diarahkan untuk mencegah dan menanggulangi kemungkinan terjadinya kesemerawutan lalu lintas akibat bercampurnya lalu lintas regional dan lalu lintas lokal, melalui pengaturan sistem sirkulasi dan pengaturan fungsi hirarkis jaringan transportasinya. Hal ini penting dilakukan mengingat sistem



transportasi memiliki pengaruh yang besar dalam tingkat efektifitas dan efisiensi interaksi kegiatan-kegiatan kota.

Disamping itu, pengembangan sistem transportasi juga diarahkan pada pembentukan suatu sistem pergerakan lokal dan regional yang serasi dan terpadu dalam satu sistem transportasi darat dan sungai..

Rencana pengembangan sistem transportasi darat terutama diarahkan pada hal-hal berikut:

1. Penentuan fungsi hirarkis sistem jaringan jalan.
2. Peingkatan fungsi jalan yang sudah ada sesuai dengan fungsi yang ditetapkan kembali untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian desain teknis badan jalan sesuai fungsinya.
3. Pembangunan jalan-jalan baru dan jembatan sesuai dengan pola peruntukan lahan.
4. Peningkatan dan pengembangan fungsi sarana dan prasarana transportasi yang meliputi termnal dan moda angkutan umum.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, salah satu tujuan diselenggarakannya transportasi jalan adalah untuk terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi



martabat bangsa. Dalam pengembangan jaringan pelayanan di dalam Kabupaten Sintang ini untuk mendukung pembangunan simpul-simpul baru seperti bandar udara di kecamatan Tebelian, pengembangan terminal angkutan penumpang dimasing-masing kecamatan, perlu dikembangkan suatu pelayanan angkutan yang saling terkoneksi antar simpul tersebut dengan jenis moda berupa bus besar, sedang dan mobil angkutan penumpang.

Dalam penataan angkutan umum pedesaan kabupaten Sintang perlu diketahui koridor-koridor kantong penumpang untuk melihat permintaan yang ada serta melihat rencana sistem perkotaan di masing-masing kecamatan karena diperlukan adanya konektivitas antara pusat kota Sintang dengan beberapa wilayah kecamatan di kabupaten Sintang untuk mendukung aksesibilitas dan mobilisasi yang digunakan oleh penduduk. Yang perlu dilakukan adalah penyediaan angkutan umum bagi daerah PPK dan PPL. Kemudian juga akan dikembangkan model pelayanan yang terjadwal dan melakukan peremajaan terhadap angkutan umum pedesaan.

Pengembangan jaringan prasarana dilakukan dengan:

1. Optimalisasi terminal tipe B yaitu terminal Sungai Durian untuk mewujudkan lalu lintas yang lancar, aman, nyaman, tertib, selamat dan berwawasan lingkungan. Optimalisasi tersebut dilakukan dengan membuat jalur keberangkatan dan kedatangan, mengatur sirkulasi arus kendaraan masuk dan keluar, memperbaiki fasilitas tempat tunggu penumpang dan memasang rambu-rambu dan papan



informasi yang memuat jurusan, tarif dan jadwal perjalanan.

2. Optimalisasi terminal tipe C yaitu terminal Tanjungpuri. Terminal ini melayani angkutan perkotaan dan perdesaan. Optimalisasi yang dapat dilakukan adalah memperbaiki kondisi terminal, membuat jalur keberangkatan dan kedatangan, mengatur sirkulasi arus kendaraan masuk dan keluar, membuat fasilitas parkir dan memasang rambu-rambu dan papan informasi yang memuat jurusan, tarif dan jadwal perjalanan.

Berdasarkan kondisi wilayah, potensi dan kepentingan wilayah, maka sistem prasarana yang perlu dikembangkan adalah sarana prasarana darat dan sungai. Karena wilayah Kabupaten Sintang terdapat banyak sungai yang dapat dilayari antara lain sungai Kapuas, sungai Melawi dan sungai Ketungau sehingga transportasi sungai ini mempunyai peran yang cukup besar dalam sistem transportasi di Kabupaten Sintang. pengembangan transportasi sungai terutama dilakukan terhadap wilayah-wilayah yang belum dapat dilalui oleh jalan darat. Sehubungan dengan itu, arah pengembangannya adalah pengembangan armada yang mempunyai kemampuan dan kapasitas yang cukup baik dan pengamanan kawasan sepanjang sungai dari pangkalan dan buangan ranting kayu.



3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan Kabupaten Sintang di masa mendatang. Analisis isu-isu strategis dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang dilakukan dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika yang berkembang. Isu-isu strategis ini, dianalisa dan dituangkan dalam isu-isu strategis yang merupakan faktor eksternal dijabarkan kedalam Peluang dan Tantangan, sedangkan faktor internal akan dituangkan sebagai Kekuatan dan Kelemahan.

Adapun Kekuatan dan Kelemahan yang merupakan faktor internal yang ada dan dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang adalah:

3.5.1. Kekuatan Dinas Perhubungan

1. Dukungan pendanaan dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Khusus Keselamatan Transportasi Darat dan sebagainya.
2. Adanya visi dan misi yang dapat mengarahkan tujuan pembangunan kepada perwujudan cita-cita yang telah ditetapkan.
3. Kuantitas SDM yang dapat mendukung proses pelaksanaan program/kegiatan.



4. Sarana dan prasarana pendukung untuk mempermudah dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sedikit demi sedikit ditingkatkan.

3.5.2. Kelemahan Dinas Perhubungan

1. Keterbatasan kompetensi SDM terutama yang berlatar belakang teknis, kuantitas yang tidak didukung dengan kualitas akan menghambat kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan kemampuan dan profesionalisme melalui diklat-diklat atau beasiswa pendidikan formal. Selain itu perlu diusulkan untuk ditempatkan personil yang berkualitas dan memiliki visi untuk bekerja untuk kemajuan SKPD.
2. Keterbatasan dukungan anggaran pembangunan dibidang Perhubungan. Pelayanan dibidang Perhubungan, memerlukan penyediaan dana yang memadai baik dari APBD maupun APBN sehingga fungsi pelayanan dapat berjalan dengan semestinya.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINTANG

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Berdasarkan telaahan Visi , Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih sebagaimana yang tertuang pada Bab sebelumnya, maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang untuk periode 2016-2021sebagaimana uraian berikut ini.

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang

Tujuan merupakan suatu yang ingin dicapai selama periode 2016-2021, dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih sehingga rumusannya harus dapat menggambarkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada masa mendatang, sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang merupakan permasalahan pokok bidang perhubungan yang ada di Kabupaten Sintang yang menjadi focus dalam pengambilan kebijakan dalam bidang perhubungan untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah



dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Sintang periode 2016-2021. Dalam mencapai misi ke 3 (tiga) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Periode 2016-2021 Kabupaten Sintang yaitu : **“ Mengoptimalkan Penyediaan Infrastruktur Dasar Guna Pengembangan Potensi Ekonomi dan Sumber Daya Daerah”** adalah bagaimana upaya Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang berupaya memberikan pelayanan berupa peningkatan Fasilitas sarana dan prasarana dibidang perhubungan guna meningkatkan perekonomian serta meningkatkan kualitas transportasi di Kabupaten Sintang .

Berdasarkan hal tersebut diatas , maka Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang untuk 5 (lima) tahun kedepan (2016-2021) dalam mewujudkan misi ke 3 (tiga) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih sebagaimana tampak pada table berikut ini :



Tabel 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINTANG
YANG MENGACU KEPADA RPJMD

NO.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD 2016	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
						2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur transportasi	1. Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang	1. Jumlah arus penumpang angkutan umum darat	Orang	537.511	548.262	559.227	570.411	581.820	593.456	593.456
			2. Jumlah Orang/barang yang terangkut angkutan umum	Orang	537.511	548.262	559.227	570.411	581.820	593.456	593.456
			3. Jumlah orang/barang melalui Dermaga/bandara/terminal pelabuhan	Orang	537.511	548.262	559.227	570.411	581.820	593.456	593.456
			4. Jumlah angkutan darat	Unit	359	361	365	368	370	374	374



			5. Jumlah pelabuhan laut/udara/Terminal Bis									
			- Pelabuhan sungai	Unit		3	3	3	3	3	3	
			- Pelabuhan Udara	Unit		2	2	2	2	2	2	
			- Terminal Bis	Unit		5	5	5	5	5	5	
2.	Menurunnya Jumlah kecelakaan transportasi	1. Tersedianya Fasilitas Perlengkapan rambu-rambu lalu lintas	1. pemasangan rambu-rambu	%	59,93	65,76	78,44	85,01	90,10	95	95	
		2. Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum dan kapal yang beroperasi dalam Kab. Sintang	1. Jumlah izin trayek	Trayek	72	72	73	74	74	75	75 75	
			2. Jumlah Uji KIR angkutan Umum	Unit	86	88	92	96	100	104	104	
			3. Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	36	37	39	41	41	43	43	
			4. Lama Pengujian Kelayakan angkutan Umum (KIR)	Tahun								
			Pengujian Awal									
			a. JBB s.d 2.500 Kg	Rp.	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
			b. JBB 2.500 s.d 7.500 Kg	Rp.	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
			c. JBB 7.500 s.d 14.000 Kg	Rp.	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
			d. JBB >14.000 Kg	Rp.	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000



			Pengujian Berkala								
			e. JBB s.d 2.500 Kg	Rp.	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
			f. JBB 2.500 s.d 7.500 Kg	Rp.	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
			g. JBB 7.500 s.d 14.000 Kg	Rp.	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
			h. JBB >14.000 Kg	Rp.	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
			Pengujian Penghapusan Kendaraan								
			Kendaraan Bermotor beroda 2 (dua)	Rp.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
			Kendaraan Bermotor beroda 4 (empat)	Rp.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
			Kendaraan Bermotor beroda 6 (enam)	Rp.	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
			Kendaraan Bermotor lebih 6 (enam) roda	Rp.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000



BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan

Strategi merupakan pemikiran konseptual, analitis, dan komprehensif memang langkah-langkah yang diperlukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi pembangunan yang telah ditetapkan diarahkan pada kebijakan untuk mewujudkan visi Renstra tahun 2016-2021.

Dengan demikian, arah kebijakan akan menjadi penuntun terhadap program-program indikatif yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021. Rangkaian strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel berikut:



Tabel 5.1
STRATEGI DAN KEBIJAKAN RENSTRA DISHUB TAHUN 2016-2021

VISI : TERWUJUDNYA TRANSPORTASI YANG HANDAL DAN BERDAYA SAING			
Misi 1 : Mengoptimalkan Penyediaan infrastruktur yang berkualitas , tepat guna , dapat melayani seluruh wilayah dan mencakupi kebutuhan masyarakat			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi	1. Tersedianya infrastruktur / sarana dan prasarana transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang	Strategi yang berorientasi pada peningkatan kualitas dan kuantitas infrastuktur	Pembangunan dan peningkatan infrastruktur transportasi yang mencakup darat, sungai, udara dalam rangka mendukung pergerakan orang, barang dan jasa



Misi 2 : Meningkatkan tingkat keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pelayanan transportasi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Menurunnya jumlah kecelakaan transportasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya fasilitas perlengkapan rambu-rambu lalu lintas 2. Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum dan kapal yang beroperasi dalam Kabupaten Kota 	Strategi yang berorientasi pada peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan fasilitas perlengkapan jalan dan sungai 1. Peningkatan Layanan perijinan kendaraan darat maupun sungai 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dan keamanan dalam transportasi



BAB VI

RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yaitu tahun 2016-2021 dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Program-program pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021, terdiri dari 5 (lima) Program Rutin Administrasi Perkantoran dan 9 (sembilan) Program Pokok Pembangunan. Adapun program-program tersebut sebagaimana berikut :

Program Rutin Administrasi Perkantoran :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Program Pokok Pembangunan :

1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.
2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.



-
3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.
 4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan.
 5. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.
 6. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.



MATRIKS INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
KABUPATEN SINTANG

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN					INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)	KONDISI KINERJA AWAL 2016	2017		2018		2019		2020		2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE	PENANGGUNG JAWAB
								TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
								7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	07	01	01	01	PERHUBUNGAN														
1	07	01	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terperuhnya / tersedanya fasilitas kantor sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran													
1	07	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materi Rp. 3.000,00 Jumlah materi Rp. 6.000,00 Jumlah paket/pengiriman Buku cek	4 jenis	380 lembar 60 lembar 10 kg 6 buah	3.170.000,00	380 lembar 60 lembar 10 kg 6 buah	3.487.000,00	380 lembar 60 lembar 10 kg 6 buah	3.835.700,00	380 lembar 60 lembar 10 kg 6 buah	4.219.270,00	380 lembar 60 lembar 10 kg 6 buah	4.641.197,00	1900 lembar 300 lembar 50 kg 30 buah	Dishub
1	07	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pemakaian jasa telepon Jumlah pemakaian jasa listrik Jumlah pemakaian jasa internet	3 jenis	12 bulan 12 bulan 12 bulan	124.680.000,00	12 bulan 12 bulan 12 bulan	137.148.000,00	12 bulan 12 bulan 12 bulan	150.882.800,00	12 bulan 12 bulan 12 bulan	165.949.080,00	12 bulan 12 bulan 12 bulan	182.543.988,00	12 bulan 12 bulan 12 bulan	Dishub
1	07	01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah KIR kendaraan roda 4 Jumlah KIR kendaraan roda 6 Jumlah pajak kendaraan roda 2 Jumlah pajak kendaraan roda 4 Jumlah pajak kendaraan roda 6	24 unit	2 unit 2 unit 14 unit 4 unit 2 unit	14.578.000,00	2 unit 2 unit 15 unit 5 unit 2 unit	16.035.800,00	2 unit 2 unit 16 unit 5 unit 2 unit	17.639.380,00	2 unit 2 unit 17 unit 5 unit 2 unit	19.403.318,00	2 unit 2 unit 18 unit 5 unit 2 unit	21.343.649,80	2 unit 2 unit 18 unit 5 unit 2 unit	Dishub
1	07	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan dan bahan pembersih Jumlah tenaga kebersihan Jumlah ATK	25 jenis 5 orang 40 jenis	25 jenis 5 orang 40 jenis	66.918.200,00	25 jenis 5 orang 40 jenis	68.925.746,00	25 jenis 5 orang 40 jenis	70.993.518,38	25 jenis 5 orang 40 jenis	73.123.323,93	25 jenis 5 orang 40 jenis	75.317.023,65	25 jenis 5 orang 40 jenis	Dishub
1	07	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah perlengkapan komputer lainnya	5 jenis	4 jenis	55.445.500,00	4 jenis	57.108.865,00	4 jenis	58.822.130,95	4 jenis	60.586.794,88	4 jenis	62.404.398,72	4 jenis	Dishub
1	07	01	01	11	Penyediaan barang celakan dan penggandaan	Jumlah barang celakan Jumlah penggandaan	19 jenis 20000 lembar	19 jenis 20000 Lembar	47.319.075,00	19 jenis 20000 Lembar	52.050.982,50	19 jenis 20000 lembar	57.256.080,75	19 jenis 20000 lembar	62.981.688,83	19 jenis 20000 lembar	69.279.857,71	19 jenis 20000 lembar	Dishub
1	07	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik	10 jenis	10 jenis	6.480.000,00	12 Jenis	7.128.000,00	12 jenis	7.840.800,00	12 jenis	8.624.880,00	12 jenis	9.487.368,00	12 jenis	Dishub
1	07	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar	3 jenis	4 jenis	4.020.000,00	3 Jenis	4.422.000,00	3 jenis	4.864.200,00	3 jenis	5.350.620,00	4 jenis	5.885.682,00	4 jenis	Dishub
1	07	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan Jumlah snack	915 bungkus 915 kotak	1020 bungkus 1020 Kotak	35.700.000,00	1 bungkus 1 Kotak	39.270.000,00	1.000 bungkus 1.000 kotak	43.197.000,00	1.000 bungkus 1.000 kotak	47.516.700,00	1.000 bungkus 1.000 kotak	52.268.370,00	1.000 bungkus 1.000 kotak	Dishub



1	07	01	01	18	Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi konsultasi dalam daerah provinsi	39 kali	18 kali	298.395.000,00	35 kali	328.234.500,00	35 kali	361.097.950,00	35 kali	397.163.745,00	35 kali	436.880.119,50	35 kali	Dishub
						Jumlah rapat koordinasi konsultasi luar daerah provinsi	60 kali	18 kali		25 kali		25 kali		25 kali		25 kali		25 kali	
1	07	01	01	28	Pameran Pembangunan	Jumlah kegiatan Pekan Raya Sintang	1 kegiatan	1 kegiatan	25.250.000,00	1 kegiatan	27.775.000,00	1 kegiatan	30.552.500,00	1 kegiatan	33.607.750,00	1 kegiatan	36.968.525,00	1 kegiatan	Dishub
						Jumlah kegiatan Pawai Pembangunan	1 kegiatan	1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan	
1	07	01	01	36	Pembinaan ke dalam daerah	Jumlah pembinaan ke dalam daerah	28 kali	13 kali	52.840.000,00	21 kali	58.124.000,00	21 kali	63.936.400,00	21 kali	70.330.040,00	21 kali	77.363.044,00	21 kali	Dishub
1	07	01	01	44	Jasa tenaga pendukung operasional dan keamanan perkantoran	Jumlah tenaga teknis lapangan	6 orang	6 orang	225.827.400,00	6 orang	225.600.000,00	6 orang	225.600.000,00	6 orang	225.600.000,00	6 orang	225.600.000,00	6 orang	Dishub
						Jumlah tenaga administrasi perkantoran	3 orang	3 orang		3 orang		3 orang		3 orang		3 orang		3 orang	
						Jumlah tenaga sopir/motris	2 orang	2 orang		2 orang		2 orang		2 orang		2 orang		2 orang	
1	07	01	01	47	Penyediaan bahan bakar minyak dan gas	Jumlah BBM kendaraan operasional	5320 liter	5551 liter	65.202.160,00	6198 liter	71.722.376,00	6.773 liter	78.894.613,60	6.773 liter	86.784.074,96	6.773 liter	90.000.000,00	6.773 liter	Dishub
						Jumlah BBM mesin PKB	480 liter	480 liter		480 liter									
1	07	01	01	58	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terhadap Program dan Kegiatan	Jumlah monitoring yang terlaksana	25 kali	18 kali	57.329.110,00	20 kali	70.700.000,00	22 kali	75.000.000,00	25 kali	75.000.000,00	25 kali	75.000.000,00	25 kali	Dishub
1	07	01	01	90	Peresmian Bandar Udara Tebelan	Jumlah kegiatan peresmian Bandara Tebelan	-	1 kegiatan	100.038.000,00									1 kegiatan	Dishub
1	07	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya dan terpeliharanya fasilitas sarana dan prasarana aparatur dalam melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran													
1	07	01	02	03	Pengadaan bangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor Dishubkominfo yang tersedia	1 unit			1 unit	4.000.000.000,00								
1	07	01	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	24 unit			2 unit	280.000.000,00	1 unit	30.000.000,00	1 unit	30.000.000,00	1 unit	30.000.000,00	1 unit	Dishubkominfo
1	07	01	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah bendera yang tersedia	21 buah	15 buah	8.875.000,00	21 buah	28.000.000,00	21 buah	28.000.000,00	21 buah	28.000.000,00	21 buah	28.000.000,00	21 buah	Dishub
						Jumlah spanduk yang tersedia	140 meter	140 meter		140 meter		140 meter		140 meter		140 meter		140 meter	
1	07	01	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	3 jenis	2 jenis	8.400.000,00	4 jenis	25.000.000,00	5 jenis	25.000.000,00	5 jenis	25.000.000,00	5 jenis	27.500.000,00	5 jenis	Dishub
1	07	01	02	10	Pengadaan mebeubar	Jumlah mebeubar	3 jenis	3 jenis	13.200.000,00	3 jenis	16.000.000,00	3 jenis	17.600.000,00	3 jenis	19.360.000,00	3 jenis	21.296.000,00	3 jenis	Dishub
1	07	01	02	22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jumlah luas gedung kantor	200 m2			m2	-	m2	-	m2	-	m2	-	m2	Dishub
1	07	01	02	24	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan roda 2	14 unit	14 unit	82.960.000,00	15 unit	91.256.000,00	16 unit	100.381.600,00	17 unit	110.419.760,00	14 unit	121.461.736,00	14 unit	Dishub
						Jumlah kendaraan roda 4	4 unit	4 unit		5 unit		5 unit		5 unit		5 unit		5 unit	
						Jumlah kendaraan roda 6	2 unit	2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit	
1	07	01	02	28	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor	3 jenis	19 unit	14.040.000,00	8 jenis	15.444.000,00	8 jenis	16.988.400,00	8 jenis	18.687.240,00	8 jenis	20.555.964,00	8 jenis	Dishub
1	07	01	02	30	Pemeliharaan rutin / berkala lingkungan kantor	Jumlah luas lingkungan kantor	400m2												
1	07	01	02	56	Pengadaan perangkat komputer dan printer	Jumlah komputer	18 unit	1 unit	11.300.000,00	1 unit	12.430.000,00	1 unit	13.673.000,00	1 unit	15.040.300,00	1 unit	16.544.330,00	1 unit	Dishub
						Jumlah laptop/notebook	12 unit	0 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit	
						Jumlah printer	15 unit	1 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit	



1	07	01	02	58	Pemeliharaan rutin perangkat komputer dan printer	Jumlah komputer	18 unit	24 unit	21.500.000,00	25 unit	23.850.000,00	26 unit	26.015.000,00	27 unit	28.616.500,00	28 unit	31.478.150,00	28 unit	Dishub	
						Jumlah laptop/notebook	12 unit	19 unit		20 unit		21 unit		22 unit	23 unit		23 unit		Dishub	
1	07	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur														Dishub	
1	07	01	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	75 stel			75 Stel	58.000.000,00	75 stel	58.000.000,00	75 stel	60.000.000,00	75 stel	60.000.000,00	75 stel	Dishub	
1	07	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Mengkubertakan personil Dishukominfo dalam pelatihan atau diklat teknis maupun fungsional sehingga terperluhinya tenaga teknis maupun fungsional yang handal pada bidang tugasnya masing-masing														
1	07	01	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan	10 ASN	2 orang	52.030.000,00	8	Orang	57.233.000,00	10 orang	62.956.300,00	12 orang	69.251.930,00	14 orang	76.177.123,00	14 orang	Dishub
1	07	01	06		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya laporan kinerja instansi pemerintah, tersusunnya prognosis realisasi anggaran serta tersusunnya laporan keuangan akhir tahun														
1	07	01	06	02	Penyusunan pelaporan semesteran realisasi anggaran	Jumlah laporan semester dan prognosis	1 dokumen	1 dokumen	1.472.500,00	1 Dokumen	1.619.750,00	1 dokumen	1.781.725,00	1 dokumen	1.959.897,50	1 dokumen	2.155.887,25	1 dokumen	Dishub	
1	07	01	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan	1 dokumen	1 dokumen	2.585.000,00	1 Dokumen	2.843.500,00	1 dokumen	3.127.850,00	1 dokumen	3.440.635,00	1 dokumen	3.784.698,50	1 dokumen	Dishub	
1	07	01	06	06	Penyusunan laporan capaian kinerja dan khtsar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja Tahunan	1 dokumen	1 dokumen	2.282.000,00	1 Dokumen	2.510.200,00	1 dokumen	2.761.220,00	1 dokumen	3.037.342,00	1 dokumen	3.341.076,20	1 dokumen	Dishub	
1	07	01	06	16	Penyusunan Renstra	Jumlah Renstra	-									1 dokumen	5.000.000,00	1 dokumen	Dishub	
1	07	01	15		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tersedianya dokumen perencanaan standar dan prosedur serta kebijakan dalam melaksanakan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan													Dishub	
					Perencanaan demaga Sungai Ringin	Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia	-			1	Dokumen	100.000.000,00							Dishub	
					Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	Jumlah terminal darat yang ditingkatkan	4 terminal	2 terminal	100.000.000,00	2 Terminal	100.000.000,00	2 terminal	100.000.000,00						Dishub	
1	07	01	16		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Terlaksananya pemeliharaan alat-alat pengujian kendaraan bermotor, fasilitas perlengkapan jalan, balai pengujian kendaraan bermotor serta terminal dan pelabuhan														
1	07	01	16	04	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	Jumlah terminal/demagalur pelayaran sungai yang diperbaiki	4 alur sungai	3 alur sungai	300.710.000,00	2 alur sungai	200.000.000,00	2 alur sungai	200.000.000,00	2 alur sungai	200.000.000,00	2 alur sungai	200.000.000,00	2 alur sungai	Dishub	
1	07	01	17		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Terlaksananya pengawasan, pengevaluasian serta pelaporan terhadap angkutan umum di terminal dan demaga														
1	07	01	17	02	Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan umum	Tertib administrasi kendaraan angkutan umum	1 kegiatan	3 kali	7.530.000,00	24 Kali	50.000.000,00	24 kali	50.000.000,00	24 kali	55.000.000,00	36 kali	70.000.000,00	36 kali	Dishub	
1	07	01	17	06	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal	Keamanan dan kenyamanan pengguna angkutan pada hari raya idul Fitri, natal dan tahun baru	1 kegiatan	2 kegiatan	24.570.000,00	3 Kegiatan	55.000.000,00	3 kegiatan	55.000.000,00	3 kegiatan	60.000.000,00	3 kegiatan	65.000.000,00	3 kegiatan	Dishub	
1	07	01	17	10	Penciptaan layanan cepat, tepat, murah dan mudah	Terlaksananya pelayanan administrasi kapal di lempat	1 kegiatan	3 kecamatan	51.109.360,00	13 Kecamatan	100.000.000,00	13 kecamatan	100.000.000,00	13 kecamatan	100.000.000,00	13 kecamatan	100.000.000,00	13 kecamatan		
1	07	01	17	13	Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan	Tersedianya bahan kelengkapan administrasi dan kelayakan pelayanan angkutan	1 kegiatan	1 tahun	11.290.000,00	1 Tahun	27.500.000,00	1 tahun	30.000.000,00	1 Tahun	33.000.000,00	1 tahun	35.000.000,00	1 tahun	Dishub	



1	07	01	17	14	Sosialisasi/penyuluhan keterangan lalu lintas dan angkutan	Teraksananya sosialisasi dan penyuluhan keterangan lalu lintas dan angkutan	1 kegiatan	1 kecamatan	3.795.000,00	36 Kali	25.000.000,00	36 kali	27.000.000,00	36 Kali	27.000.000,00	36 kali	30.000.000,00	36 kali	Dishub
1	07	01	17	15	Kegiatan pembinaan sopir/juru mudir/awak kendaraan angkutan umum teladan	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran pengemudi kendaraan akan keselamatan berlalu lintas	1 kegiatan	20 orang	18.679.500,00	20 Orang	35.000.000,00	20 orang	35.000.000,00	20 Orang	40.000.000,00	20 orang	40.000.000,00	20 orang	Dishub
1	07	01	17	17	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya data bahan evaluasi dan pelaporan untuk peningkatan pelayanan angkutan	1 kegiatan	2 kali	2.020.000,00	5 Kecamatan	15.000.000,00	5 kecamatan	17.000.000,00	5 kecamatan	20.000.000,00	5 kecamatan	25.000.000,00	5 kecamatan	Dishub
1	07	01	17	19	Kegiatan pembinaan pelajar pelopor lalu lintas dan angkutan jalan	Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan pelajar akan keselamatan berlalu lintas	1 kegiatan	25 orang	27.879.500,00	25 Orang	30.887.450,00	25 orang	33.734.195,00	25 Orang	37.107.614,50	20 orang	40.818.375,95	20 orang	Dishub
1	07	01	17	24	Pendataan dan pengelompokan kapal angkutan sungai	Jumlah kecamatan yang terdata kapal angkutan sungai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	07	01	17	25	Kegiatan pengawasan terhadap kelengkapan dokumen dan sarana keselamatan kapal angkutan sungai	Teraksananya pengawasan terhadap kelengkapan dokumen dan sarana keselamatan kapal angkutan sungai	1 kegiatan	1 kegiatan	48.100.000,00	2 Kegiatan	48.100.000,00	2 kegiatan	48.100.000,00	2 kegiatan	48.100.000,00	2 kegiatan	48.100.000,00	2 kegiatan	Dishub
1	07	01	17	26	Survey penetapan jaringan trayek angkutan sungai	Jumlah dokumen jaringan trayek angkutan sungai yang dihasilkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	07	01	17	27	Kegiatan pengamanan dan keterangan di demaga/pelabuhan	Terciptanya keamanan dan ketertiban penumpang angkutan umum di demaga/pelabuhan pada hari raya Idul Fitri dan Natal	-	2 kegiatan	8.000.000,00	2 Kegiatan	8.000.000,00	2 kegiatan	8.000.000,00	2 kegiatan	8.000.000,00	2 kegiatan	8.000.000,00	2 kegiatan	Dishub
1	07	01	17	32	Kegiatan pengumpulan dan analisis data kepelabuhanan	Tersedianya data kepelabuhanan	-	1 Kegiatan	35.000.000,00	2 kegiatan	8.000.000,00	2 kegiatan	8.000.000,00	2 kegiatan	8.000.000,00	2 kegiatan	8.000.000,00	2 kegiatan	Dishub
1	07	01	18		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Teraksananya pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	07	01	18	01	Pembangunan gedung terminal	Jumlah terminal yang dibangun	5 terminal	-	-	-	-	-	-	-	-	1 terminal	2.000.000.000,00	1 terminal	Dishub
1	07	01	18	02	Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal	Jumlah halte yang dibangun/direhabilitasi	45 halte	1 halte	40.000.000,00	2 Halte	100.000.000,00	2 halte	100.000.000,00	2 Halte	100.000.000,00	2 halte	100.000.000,00	2 halte	Dishub
1	07	01	18	04	Pembangunan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan	Jumlah tambatan perahu yang dibangun/direhabilitasi/ditingkatkan	256 unit	13 unit	937.770.000,00	15 Unit	1.500.000.000,00	15 unit	1.500.000.000,00	15 Unit	1.500.000.000,00	15 unit	1.500.000.000,00	15 unit	Dishub
						Jumlah demaga Sungai Durian sisi darat yang tersedia	-	1 paket	19.000.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	07	01	18	07	Penataan Lokasi Parkir	Jumlah halaman parkir yang tersedia pada 19 titik dan pasar Junjung Buh	2 titik	-	-	19 Lokasi	1.000.000.000,00	1 lokasi	5.000.000.000,00	1 lokasi	5.000.000.000,00	-	-	-	Dishub
1	07	01	18	13	Pembangunan Bandar Udara Tebelian	Jumlah bandar udara Tebelian yang tersedia	1 unit	-	-	1,00 Paket	5.000.000.000,00	1,00 paket	5.000.000.000,00	1,00 paket	5.000.000.000,00	1,00 paket	5.000.000.000,00	1,00 paket	Dishub
1	07	01	18	17	Pengadaan Fasilitas Kelengkapan Demaga/Pelabuhan	Jumlah fasilitas kelengkapan demaga/pelabuhan yang tersedia	2 unit	-	-	1 Paket	350.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1,00 paket	Dishub
1	07	01	18	19	Penyelesaian tinjauan pembangunan Bandara Tebelian Sintang	Tersedianya dokumen MB Bandara Tebelian Sintang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	07	01	18	20	Penyusunan Rekomendasi Teknis Bandar Udara Tebelian	Tersedianya dokumen rekomendasi teknis Bandara Tebelian Sintang	-	1 kegiatan	76.487.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	07	01	19		Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Terciptanya arus lalu lintas yang tertib, aman dan lancar serta tercapainya keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	07	01	19	01	Pengadaan rambu rambu lalu lintas	Tersedianya rambu lalu lintas sungai	20 unit	30 unit	450.000.000,00	30 Unit	450.000.000,00	30 unit	450.000.000,00	30 Unit	450.000.000,00	30 unit	450.000.000,00	30 unit	Dishub
1	07	01	19	04	Pengendalian disiplin perlengkapan kendaraan di jalan	Teraksananya pengawasan dan pemberian administrasi dan kelengkapan kendaraan darat dan sungai, pendataan rambu-rambu lalu lintas	1 kegiatan	25 kali	38.000.000,00	28 Kali	41.800.000,00	32 kali	45.980.000,00	35 kali	50.578.000,00	35 kali	55.635.800,00	35 kali	Dishub
1	07	01	19	08	Pemeliharaan alat pemberi isyarat lalu lintas	Terciptanya ketertiban dalam berlalu lintas	4 simpang	4 simpang	85.000.000,00	4 Simpang	120.000.000,00	5 simpang	175.000.000,00	5 simpang	175.000.000,00	5 simpang	150.000.000,00	5 simpang	Dishub
1	07	01	19	09	Forum lalu lintas dan angkutan jalan	Pembahasan Penyelesaian permasalahan lalu lintas	3 kali	3 kali	25.000.000,00	3 Kali	30.000.000,00	6 kali	45.000.000,00	6 Kali	45.000.000,00	6 kali	50.000.000,00	6 kali	Dishub



1	07	01	19	10	Pengadaan rambu rambu lalu lintas (DAK)	Tersedianya rambu lalu lintas	188 bh	400 Buah	640.000.000,00	400 Buah	660.000.000,00	300 buah	510.000.000,00	250 Buah	437.500.000,00	300 buah	540.000.000,00	300 buah	Dishub
1	07	01	19	11	Pengadaan marka jalan (DAK)	Tersedianya marka jalan sebagai petunjuk berlalu lintas	180 m2	600 m2	210.000.000,00	750 m2	300.000.000,00	750 m2	337.500.000,00	750 m2	375.000.000,00	750 m2	412.500.000,00	750 m2	Dishub
1	07	01	19	14	Pengadaan pagar pengaman jalan (DAK)	Tersedianya pagar pengaman jalan untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas	110 m	250 Meter	437.500.000,00	300 Meter	540.000.000,00	300 meter	540.000.000,00	400 meter	740.000.000,00	400 meter	740.000.000,00	400 meter	Dishub
1	07	01	19	19	Pengumpulan dan analisa data lalu lintas	Tersedianya data fasilitas keselamatan lalu lintas jalan	1 dokumen	1 Dokumen	5.500.000,00	1 Dokumen	11.000.000,00	1 dokumen	11.000.000,00	1 dokumen	11.000.000,00	1 dokumen	15.000.000,00	1 dokumen	Dishub
1	07	01	19	20	Survey rambu lalu lintas sungai	Jumlah dokumen data titik rambu lalu lintas sungai pada alur pelayaran sungai Ketungau dan Kayan													
1	07	01	19	21	Pengadaan alat pemberi isyarat lalu lintas	Tersedianya APILL di persimpangan dalam kota Sintang	4 simpang	-	-	1 Simpang	250.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	Dishub
1	07	01	19	22	Pengadaan warning light	Tersedianya warning light di daerah rawan kecelakaan lalu lintas	-	-	-	3 Titik	540.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	Dishub
1	07	01	19	23	Lomba Terib Lalu Lintas (Mahana Tabu Negara)	Kut serta seleksi Kota Terib Lalu Lintas	-	1 Kegiatan	45.000.000,00	1 Kegiatan	49.500.000,00	1 kegiatan	54.450.000,00	1 kegiatan	59.895.000,00	1 kegiatan	65.884.500,00	1 kegiatan	Dishub
1	07	01	19	24	Rakomendasi Yelms KRPOP Bandar Udara Tebelian		-	1 Dokumen	30.000.000,00	1 Dokumen	30.000.000,00	1 dokumen	30.000.000,00	1 dokumen	30.000.000,00	1 dokumen	30.000.000,00	1 dokumen	Dishub
1	07	01	19	25	Kegiatan pengawasan terhadap dokumen dan sarana keselamatan kapal angkutan sungai dan danau	Keselamatan dan keselamatan awak kapal dan penumpang umum	-	4 Kali	30.000.000,00	4 Kali	30.000.000,00	4 kali	30.000.000,00	4 kali	30.000.000,00	4 kali	30.000.000,00	4 kali	Dishub
1	07	01	19	26	Pengawasan keselamatan alur pelayaran sungai dan danau	Terciptanya keamanan alur pelayaran bagi kapal angkutan sungai dan danau	-	3 alur pelayaran	60.000.000,00	3 alur pelayaran	60.000.000,00	3 alur pelayaran	60.000.000,00	3 alur pelayaran	60.000.000,00	3 alur pelayaran	60.000.000,00	3 alur pelayaran	Dishub
1	07	01	19	27	Pemeliharaan alat bantu sarana navigasi lampu penerangan di demaga/pelabuhan	Terciptanya keterlibatan dan keamanan di demaga/pelabuhan	-	2 Demaga	80.000.000,00	2 Demaga	80.000.000,00	2 demaga	80.000.000,00	2 demaga	80.000.000,00	2 demaga	80.000.000,00	2 demaga	Dishub
1	07	01	19	28	Pemetaan alur pelayaran sungai kabupaten	Tersedianya data topografi dan hidrografi alur pelayaran sungai kabupaten	-	-	-	3 sungai	475.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	Dishub
1	07	01	19	29	Kegiatan pengendalian dan pengawasan wilayah perairan daratan	Terciptanya keamanan dan kenyamanan lalu lintas di sungai	-	-	-	20 Kali	35.000.000,00	20 kali	35.000.000,00	20 kali	35.000.000,00	20 kali	35.000.000,00	20 kali	Dishub
1	07	01	20		Program Peningkatan Kelangkaan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Tersedianya gedung serta alat-alat pengujian kendaraan bermotor yang baik di Kabupaten Sintang													Dishub
1	07	01	20	01	Pengadaan gedung pengujian kendaraan bermotor	Jumlah pekerjaan peningkatan gedung pengujian		1 Paket	100.000.000,00										Dishub
1	07	01	20	02	Pengadaan alat uji kendaraan bermotor	Jumlah alat uji yang tersedia	3 unit											1 paket	Dishub
						- Axle Play Detector				1 Unit	392.110.000,00							8 unit	Dishub
						- Sound Level Meter				1 Unit	46.600.000,00								Dishub
						- Alat Uji Dimensi Digital				1 Unit	9.477.500,00								Dishub
						- Tint Window Meter				1 Unit	39.100.000,00								Dishub
						- Side Slips				1 Unit	251.750.000,00								Dishub
1	07	01	20	03	Pelaksanaan uji pelik kendaraan bermotor	Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor yang dikalibrasi	-	3 Unit	50.000.000,00										Dishub
						JUMLAH			24.345.777.305,00		19.002.323.669,50		16.352.202.363,68		16.564.235.504,59		13.856.216.864,28		



6.2. KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA

Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang di harapkan berdasarkan Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 , maka kegiatan-kegiatan pokok yang akan di laksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang pada tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.

Dengan Hasil (Outcome) yang diharapkan :
Tersedianya Fasilitas Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat.

Indikator Kinerja (Outcome) :

Terminal angkutan darat yang meningkat fungsinya.

Dengan Kegiatan :

1) Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat.

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah terminal darat dalam kondisi baik.

2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ.

Dengan Hasil (Outcome) yang diharapkan :
Berfungsinya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Dengan Baik.

Indikator Kinerja (Outcome) :



Jumlah terminal/pelabuhan/balai pengujian kendaraan bermotor/fasilitas perlengkapan jalan/alur pelayaran sungai yang terpelihara

Dengan Kegiatan :

1) Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah terminal/pelabuhan/balai pengujian kendaraan bermotor/fasilitas perlengkapan jalan /alur pelayaran sungai yang dalam kondisi baik.

3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.

Dengan Hasil (Outcome) yang diharapkan : *Terciptanya Kelancaran, Keamanan dan Ketertiban Arus Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.*

Indikator Kinerja (Outcome) :

Terlaksananya pengawasan, pelayanan administrasi, pengevaluasian serta pelaporan terhadap angkutan umum di terminal dan dermaga.

Dengan Kegiatan :

1) Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah kegiatan pemeriksaan administrasi dan kelengkapan kendaraan darat.



- 2) Penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal
Indikator Keluaran (Output) : Jumlah pengawasan dan penertiban angkutan pada hari raya Idul Fitri, Natal dan tahun Baru di terminal.
- 3) Penciptaan layanan cepat, tepat, murah dan mudah
Indikator Keluaran (Output) : Jumlah kecamatan yang diberikan pelayanan perizinan administrasi kapal di tempat.
- 4) Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan
Indikator Keluaran (Output) : Jumlah jenis bahan kelengkapan administrasi dan kelayakan pelayanan angkutan yang tersedia.
- 5) Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
Indikator Keluaran (Output) : Jumlah kegiatan sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan yang terlaksana.
- 6) Pembinaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan
Indikator Keluaran (Output) : Jumlah peserta pembekalan AKUT tingkat kabupaten
- 7) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Indikator Keluaran (Output) : Jumlah kecamatan tempat dilaksanakannya monitoring dan evaluasi pelayanan angkutan



- 8) Pembinaan pelajar pelopor lalu lintas dan angkutan jalan
Indikator Keluaran (Output) : Jumlah peserta pelajar pelopor lalu lintas dan angkutan jalan tingkat kabupaten
- 9) Pendataan dan pengelompokan kapal angkutan sungai
Indikator Keluaran (Output) : Jumlah kecamatan yang terdata kapal angkutan sungai
- 10) Pengawasan terhadap kelengkapan dokumen dan sarana keselamatan kapal angkutan sungai
Indikator Keluaran (Output) : Jumlah kecamatan tempat pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan dokumen kapal dan sarana keselamatan kapal angkutan sungai
- 11) Survey penetapan jaringan trayek angkutan sungai
Indikator Keluaran (Output) : Jumlah dokumen jaringan trayek angkutan sungai yang dihasilkan
- 12) Pengamanan dan ketertiban di dermaga/pelabuhan
Indikator Keluaran (Output) : Jumlah pengawasan dan penertiban angkutan pada hari raya Idul Fitri, Natal dan tahun Baru di pelabuhan/dermaga.



4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Dengan Hasil (Outcome) yang diharapkan :
Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang berkualitas.

Indikator Kinerja (Outcome) :

Terlaksananya pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana perhubungan.

Dengan Kegiatan :

1) Pembangunan gedung terminal

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah terminal yang dibangun

2) Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah halte yang dibangun

3) Pembangunan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah tambatan perahu/dermaga/pelabuhan yang dibangun/direhabilitasi /ditingkatkan beserta dokumen perencanaannya.

4) Penataan lokasi parkir

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah halaman parkir yang tersedia pada 19 titik dan pasar Junjung Buih

5) Pembangunan Bandar Udara Tebelian sisi darat



Indikator Keluaran (Output) : Jumlah bandar udara
Tebelian yang dibangun

6) Pengadaan Fasilitas Kelengkapan Dermaga/Pelabuhan

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah fasilitas
kelengkapan dermaga/pelabuhan yang tersedia

7) Penyelesaian ijin pembangunan Bandara Tebelian
Sintang

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah dokumen IMB
Bandara Tebelian Sintang yang tersedia

8) Penyusunan Rekomendasi Teknis Bandar Udara
Tebelian

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah dokumen
rekomendasi teknis Bandara Tebelian Sintang yang
tersedia

5. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.

Dengan Hasil (Outcome) yang diharapkan :
*Terciptanya Lalu Lintas yang Terkendali dan Aman Bagi
Pengguna Jalan*

Indikator Kinerja (Outcome) :

Tingkat ketertiban arus lalu lintas, keamanan dan
kelancaran serta terciptanya keamanan dan kenyamanan
bagi masyarakat pengguna jalan.



Dengan Kegiatan :

- 1) Pengadaan rambu rambu lalu lintas
Indikator Keluaran (Output) : Jumlah rambu lalu lintas sungai terpasang
- 2) Pengendalian disiplin perlengkapan kendaraan di jalan
Indikator Keluaran (Output) : Jumlah pengawasan dan penertiban administrasi dan kelengkapan kendaraan darat
- 3) Pemeliharaan alat pemberi isyarat lalu lintas
Indikator Keluaran (Output) : Jumlah alat pemberi isyarat yang dipelihara
- 4) Forum lalu lintas dan angkutan jalan
Indikator Keluaran (Output) : Jumlah bahan kebijakan bidang lalu lintas yang dihasilkan
- 5) Pengadaan rambu rambu lalu lintas (DAK)
Indikator Keluaran (Output) : Jumlah rambu lalu lintas yang terpasang
- 6) Pengadaan marka jalan (DAK)
Indikator Keluaran (Output) : Jumlah marka jalan yang tersedia
- 7) Pengadaan pagar pengaman jalan (DAK)
Indikator Keluaran (Output) : Jumlah pagar pengaman jalan yang terpasang
- 8) Pengumpulan dan analisa data lalu lintas
Indikator Keluaran (Output) : Jumlah dokumen analisis data lalu lintas



9) Survey rambu lalu lintas sungai

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah dokumen data titik rambu lalu lintas sungai pada alur pelayaran sungai Ketungau dan Kayan

10) Pengadaan alat pemberi isyarat lalu lintas

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah APILL yang terpasang di persimpangan dalam kota Sintang

11) Lomba Tertib Lalu Lintas (Wahana Tata Negara)

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah kegiatan yang diikuti

12) Pengawasan keselamatan alur pelayaran sungai dan danau

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah alur sungai yang dilakukan pengawasan pelayaran

13) Pemeliharaan fasilitas kelengkapan dermaga /pelabuhan

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah fasilitas kelengkapan dermaga/pelabuhan yang dipelihara

14) Pemetaan alur pelayaran sungai kabupaten

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah dokumen data topografi dan hidografi alur pelayaran sungai kabupaten



6. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.

Dengan Hasil (Outcome) yang diharapkan :
Terciptanya Pemenuhan Standar Kelaikan Uji Kendaraan Bermotor

Indikator Kinerja (Outcome) :

Jumlah uji kendaraan bermotor angkutan umum dan barang.

Dengan Kegiatan :

- 1) Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah pekerjaan peningkatan gedung pengujian

- 2) Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor yang tersedia

- 3) Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor yang dikalibrasi

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja , Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021, dapat dilihat pada Tabel 5.2 berikut ini :



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINTANG

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI					
						TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TARGET	Rp							
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp							
1	2	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi	- Tersedianya infrastruktur/sarana dan prasarana transportasi yang Handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang	1	07	01	15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Terlaksananya pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan																	
		1	07	01	15	07	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat	Jumlah terminal angkutan darat yang ditingkatkan fungsinya	4 Unit															
									2 Unit	100.000.000		2 Unit	100.000.000		2 Unit	100.000.000								
																		5 Unit	300.000.000	DISHUB	KAB. SINTANG			
		1	07	01	16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Terlaksananya pemeliharaan alat-alat pengujian kendaraan bermotor, fasilitas perlengkapan jalan, balai pengujian kendaraan bermotor serta terminal dan pelabuhan																	
		1	07	01	16	04	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	Jumlah terminal/pelabuhan/balai pengujian kendaraan bermotor/fasilitas perlengkapan jalan/alur pelayaran sungai yang dalam kondisi baik	4 alur sungai	3 alur sungai	300.710.000		2 alur sungai	200.000.000		2 alur sungai	200.000.000		2 alur sungai	200.000.000	5 alur sungai	1.100.710.000	DISHUB	KAB. SINTANG
		1	07	01	18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Terlaksananya pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana perhubungan																	
		1	07	01	18	01	Pembangunan gedung terminal	Jumlah terminal yang dibangun	-										1 terminal	2.000.000.000	1 terminal	2.000.000.000	DISHUB	KAB. SINTANG
		1	07	01	18	02	Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal	Jumlah halte yang dibangun/direhabilitasi	45 halte	1 halte	40.000.000		2 halte	100.000.000		2 halte	100.000.000		2 halte	100.000.000	2 halte	440.000.000	DISHUB	KAB. SINTANG



1	07	01	18	04	Pembangunan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan	Jumlah tambahan perahu/demaga/pelabuhan yang dibangun/direhabilitasi/ditingkatkan beserta perencanaannya	256 unit	13 unit	937.770.000	15 unit	1.500.000.000	15 unit	1.500.000.000	15 unit	1.500.000.000	15 unit	6.937.770.000	DISHUB	KAB. SINTANG		
						Jumlah pelabuhan Sungai Durian sisi darat yang tersedia	1 pelabuhan	1 paket	19.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	19.000.000.000	DISHUB	KAB. SINTANG		
1	07	01	18	07	Penataan Lokasi Parkir	Jumlah halaman parkir yang tersedia pada 19 titik dan pasar Junjung Buh	3 lokasi	-	-	19 lokasi	1.000.000.000	1 lokasi	5.000.000.000	1 lokasi	5.000.000.000	-	-	DISHUB	KAB. SINTANG		
1	07	01	18	13	Pembangunan Bandar Udara Tebelian sisi darat	Jumlah bandar udara Tebelian yang tersedia	1 bandara	-	-	1,00 paket	5.000.000.000	1,00 paket	5.000.000.000	1,00 paket	5.000.000.000	1,00 paket	20.000.000.000	DISHUB	KAB. SINTANG		
1	07	01	18	17	Pengadaan Fasilitas Kelengkapan Dermaga/Pelabuhan	Jumlah fasilitas kelengkapan dermaga/pelabuhan yang tersedia	2 unit	-	-	1 paket	350.000.000	-	-	-	-	1,00 paket	350.000.000	DISHUB	KAB. SINTANG		
1	07	01	18	19	Penyelesaian ijin pembangunan Bandara Tebelian Sintang	Tersedianya dokumen IMB Bandara Tebelian Sintang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISHUB	KAB. SINTANG		
1	07	01	18	20	Penyusunan Rekomendasi Teknis Bandar Udara Tebelian	Tersedianya dokumen rekomendasi teknis Bandara Tebelian Sintang	-	1 kegiatan	76.487.000	-	-	-	-	-	-	-	76.487.000	DISHUB	KAB. SINTANG		
1	07	01	17		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Terlaksananya pengawasan, pelayanan administrasi, pengevaluasian serta pelaporan terhadap angkutan umum di terminal dan dermaga															
1	07	01	17	06	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal	Jumlah pengawasan dan penerbitan angkutan pada hari raya Idul Fitri, Natal dan tahun Baru	3 Keg	2 Keg	24.570.000	3 kegiatan	55.000.000	3 Keg	55.000.000	3 Keg	60.000.000	3 kegiatan	65.000.000	259.570.000	DISHUB	KAB. SINTANG	
1	07	01	17	17	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah kecamatan tempat dilaksanakannya monitoring dan evaluasi pelayanan angkutan	9 kecamatan	2 kali	2.020.000	5 Kec.	15.000.000	5 Kec.	17.000.000	5 Kec.	20.000.000	5 Kec.	25.000.000	14 kecamatan	79.020.000	DISHUB	KAB. SINTANG
1	07	01	17	24	Pendataan dan pengelompokan kapal angkutan sungai	Jumlah kecamatan yang terdapat kapal angkutan sungai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 kegiatan	-	DISHUB	KAB. SINTANG	
1	07	01	17	32	Kegiatan pengumpulan dan analisis data kepelabuhanan	Tersedianya data kepelabuhanan	-	-	-	1 kegiatan	35.000.000	2 kegiatan	8.000.000	2 kegiatan	8.000.000	2 kegiatan	8.000.000	59.000.000	DISHUB	KAB. SINTANG	



1	07	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik	10 jenis	10 jenis	6.480.000	12 jenis	7.128.000	12 jenis	7.840.800	12 jenis	8.624.880	12 jenis	9.487.368	12 jenis	39.561.048	DISHUB	KAB. SINTANG
1	07	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar	3 jenis	4 jenis	4.020.000	3 jenis	4.422.000	3 jenis	4.964.200	3 jenis	5.350.620	4 jenis	5.886.682	4 jenis	24.542.502	DISHUB	KAB. SINTANG
1	07	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan	915 bungkus	1020 bungkus	35.700.000	1.000 bungkus	39.270.000	1.000 bungkus	43.197.000	1.000 bks	47.516.700	1.000 bks	52.268.370	5.020,00	217.952.070	DISHUB	KAB. SINTANG
						Jumlah snack	915 kotak	1020 kotak		1.000 kotak		1.000 kotak		1.000 kotak		1.000 kotak		5.020,00			
1	07	01	01	18	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dalam daerah provinsi	39 kali	18 kali	298.995.000	35 kali	328.234.500	35 kali	361.057.950	35 kali	397.163.745	35 kali	436.880.120	158 kali	1.821.731.315	DISHUB	KAB. SINTANG
						Jumlah rapat koordinasi luar daerah provinsi	60 kali	18 kali		25 kali		25 kali		25 kali		25 kali		118,00			
1	07	01	01	28	Pameran Pembangunan	Jumlah kegiatan Pekan Raya Sintang	1 kegiatan	1 kegiatan	25.250.000	1 kegiatan	27.775.000	1 kegiatan	30.552.500	1 kegiatan	33.607.750	1 kegiatan	36.968.525	5,00	154.153.775	DISHUB	KAB. SINTANG
						Jumlah kegiatan Pawai Pembangunan	1 kegiatan	1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		5,00			
1	07	01	01	36	Pembinaan ke dalam daerah	Jumlah pembinaan ke dalam daerah	28 kali	13 kali	52.840.000	21 kali	58.124.000	21 kali	63.936.400	21 kali	70.330.040	21 kali	77.363.044	97 kali	322.593.484	DISHUB	KAB. SINTANG
1	07	01	01	44	Jasa tenaga pendukung operasional dan keamanan perkantoran	Jumlah tenaga teknis lapangan	6 orang	6 orang	225.827.400	6 orang	225.600.000	6 orang	225.600.000	6 orang	225.600.000	6 orang	225.600.000	6 orang	1.128.227.400	DISHUB	KAB. SINTANG
						Jumlah tenaga administrasi perkantoran	3 orang	3 orang		3 orang		3 orang		3 orang		3 orang		3 orang			
						Jumlah tenaga sopir/motobris	2 orang	2 orang		2 orang		2 orang		2 orang		2 orang		2 orang			
1	07	01	01	47	Penyediaan bahan bakar minyak dan gas	Jumlah BBM kendaraan operasional	5320 liter	5551 liter	65.202.160	6.158 liter	71.722.376	6.773 liter	78.894.614	6.773 liter	86.784.075	6.773 liter	90.000.000	32.028,00	392.603.225	DISHUB	KAB. SINTANG
						Jumlah BBM mesin PKB	480 liter	480 liter		480 liter		liter		liter		liter		960,00			
1	07	01	01	58	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terhadap Program dan Kegiatan	Jumlah monitoring yang terlaksana	25 kali	18 kali	57.329.110	20 kali	70.700.000	22 kali	75.000.000	25 kali	75.000.000	25 kali	75.000.000	110 kali	353.029.110	DISHUB	KAB. SINTANG
1	07	01	01	90	Peresmian Bandar Udara Tebelian	Jumlah kegiatan peresmian Bandara Tebelian		1 kegiatan	100.038.000												
1	07	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya dan terpeliharanya fasilitas sarana dan prasarana aparatur dalam melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran															
1	07	01	02	03	Pengadaan bangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor	1 unit			1 unit	4.000.000.000							1 unit	4.000.000.000	DISHUB	KAB. SINTANG
1	07	01	02	05	Pengadaan kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas yang tersedia	24 unit			2 unit	280.000.000	1 unit	30.000.000	1 unit	30.000.000	1 unit	30.000.000	5 unit	370.000.000	DISHUB	KAB. SINTANG



1	07	01	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah bendera yang tersedia	21 buah	15 buah	8.875.000	21 buah	28.000.000	21 buah	28.000.000	21 buah	28.000.000	99 buah	120.875.000	DISHUB	KAB. SINTANG		
						Jumlah spanduk yang tersedia	140 meter	140 meter		140 meter		140 meter		140 meter		700 meter					
1	07	01	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	3 jenis	2 jenis	8.400.000	4 jenis	25.000.000	5 jenis	25.000.000	5 jenis	25.000.000	5 jenis	110.900.000	DISHUB	KAB. SINTANG		
1	07	01	02	10	Pengadaan mebeulair	Jumlah mebeulair	3 jenis	3 jenis	13.200.000	3 jenis	16.000.000	3 jenis	17.600.000	3 jenis	19.360.000	3 jenis	87.456.000	DISHUB	KAB. SINTANG		
1	07	01	02	22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jumlah luas gedung kantor	200 m2			m2	-	m2	-	m2	-	200 m2	-	DISHUB	KAB. SINTANG		
1	07	01	02	24	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan roda 2	14 unit	14 unit	82.960.000	15 unit	91.256.000	16 unit	100.381.600	17 unit	110.419.760	14 unit	121.461.736	14 unit	506.479.096	DISHUB	KAB. SINTANG
						Jumlah kendaraan roda 4	4 unit	4 unit		5 unit		5 unit		5 unit		5 unit		5 unit			
						Jumlah kendaraan roda 6	2 unit	2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit			
1	07	01	02	28	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor	3 jenis	19 unit	14.040.000	8 jenis	15.444.000	8 jenis	16.988.400	8 jenis	18.687.240	8 jenis	20.555.964	8 jenis	85.715.604	DISHUB	KAB. SINTANG
1	07	01	02	30	Pemeliharaan rutin / berkala lingkungan kantor	Jumlah luas lingkungan kantor	400 m2														
1	07	01	02	56	Pengadaan perangkat komputer dan printer	Jumlah komputer	18 unit	1 unit	11.300.000	1 unit	12.430.000	1 unit	13.673.000	1 unit	15.040.300	1 unit	16.544.330	5 unit	68.987.630	DISHUB	KAB. SINTANG
						Jumlah laptop/notebook	12 unit	0 unit		1 unit		1 unit		1 unit		4 unit		4 unit			
						Jumlah printer	15 unit	1 unit		2 unit		2 unit		2 unit		9 unit		9 unit			
1	07	01	02	58	Pemeliharaan rutin perangkat komputer dan printer	Jumlah komputer	18 unit	24 unit	21.500.000	25 unit	23.650.000	26 unit	26.015.000	27 unit	28.616.500	28 unit	31.478.150	28 unit	131.259.650	DISHUB	KAB. SINTANG
						Jumlah laptop/notebook	12 unit	19 unit		20 unit		21 unit		22 unit		23 unit		23 unit			
1	07	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur																
1	07	01	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya				75 stel	58.000.000	75 stel	58.000.000	75 stel	60.000.000	75 stel	60.000.000	300 stel	236.000.000	DISHUB	KAB. SINTANG
1	07	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Mengkubertakan personil Dishubkominfo dalam pelatihan atau diklat teknis maupun fungsional sehingga terpenuhinya tenaga teknis maupun fungsional yang handal pada bidang tugasnya masing-masing															
1	07	01	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan	10 orang	2 orang	52.030.000	8 orang	57.233.000	10 orang	62.956.300	12 orang	69.251.930	14 orang	76.177.123	46 orang	317.648.353	DISHUB	KAB. SINTANG
1	07	01	06		Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya laporan kinerja instansi pemerintah, tersusunnya prognosis realisasi anggaran serta tersusunnya laporan keuangan akhir tahun															



		1	07	01	06	02	Penyusunan pelaporan semester realisasi anggaran	Jumlah laporan semester dan prognosis	1 Dok	1 Dok	1.472.500	1 dokumen	1.619.750	1 Dok	1.781.725	1 Dok	1.959.898	1 Dok	2.155.887	5 Dok	8.989.760	DISHUB	KAB. SINTANG
		1	07	01	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan	1 Dok	1 Dok	2.585.000	1 Dok	2.843.500	1 Dok	3.127.850	1 Dok	3.440.635	1 Dok	3.784.699	5 Dok	15.781.684	DISHUB	KAB. SINTANG
		1	07	01	06	06	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja Tahunan	1 Dok	1 Dok	2.282.000	1 Dok	2.510.200	1 Dok	2.761.220	1 Dok	3.037.342	1 Dok	3.341.076	5 Dok	13.931.838	DISHUB	KAB. SINTANG
		1	07	01	06	16	Penyusunan Renstra	Jumlah Renstra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.000.000	KAB. SINTANG	KAB. SINTANG
Menurunnya jumlah kecelakaan transportasi	Tersedianya Fasilitas perlengkapan rambu-rambu lalu lintas	1	07	01	19		Program Pengendalian dan Pngamanan Lalu Lintas	Tingkat keterlibatan arus lalu lintas, keamanan dan kelancaran serta terciptanya keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jalan															
		1	07	01	19	01	Pengadaan rambu lalu lintas terpasang	Jumlah rambu lalu lintas sungai terpasang	20 unit	30 unit	450.000.000	30 unit	450.000.000	30 unit	450.000.000	30 unit	450.000.000	30 unit	450.000.000	110 unit	2.250.000.000	DISHUB	KAB. SINTANG
		1	07	01	19	08	Pemeliharaan alat pemberi isyarat lalu lintas	Jumlah alat pemberi isyarat yang dipelihara	4 simpang	4 simpang	85.000.000	4 simpang	120.000.000	5 simpang	175.000.000	5 simpang	175.000.000	5 simpang	150.000.000	5 simpang	705.000.000	DISHUB	KAB. SINTANG
		1	07	01	19	10	Pengadaan rambu lalu lintas (DAK)	Jumlah rambu lalu lintas yang terpasang	313 buah	400 buah	640.000.000	400 buah	660.000.000	300 buah	510.000.000	250 buah	437.500.000	300 buah	540.000.000	1650 buah	2.787.500.000	DISHUB	KAB. SINTANG
		1	07	01	19	11	Pengadaan marka jalan (DAK)	Jumlah marka jalan yang tersedia	560 m2	600 m2	210.000.000	750 m2	300.000.000	750 m2	337.500.000	750 m2	375.000.000	750 m2	412.500.000	3600 m2	1.635.000.000	DISHUB	KAB. SINTANG
		1	07	01	19	14	Pengadaan pagar pengaman jalan (DAK)	Jumlah pagar pengaman jalan yang terpasang	100 meter	250 meter	437.500.000	300 meter	540.000.000	300 meter	540.000.000	400 meter	740.000.000	400 meter	740.000.000	1650 meter	2.997.500.000	DISHUB	KAB. SINTANG
		1	07	01	19	20	Survey rambu lalu lintas sungai	Jumlah dokumen data titik rambu lalu lintas sungai pada alur pelayaran sungai Kelungau dan Kayan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISHUB	KAB. SINTANG
		1	07	01	19	21	Pengadaan alat pemberi isyarat lalu lintas	Jumlah APILL yang terpasang di persimpangan dalam kota Sintang	4 titik	-	-	1 simpang	250.000.000	-	-	-	-	-	-	5 titik	250.000.000	DISHUB	KAB. SINTANG
		1	07	01	19	22	Pengadaan warning light	Jumlah warning light terpasang di daerah rawan kecelakaan lalu lintas	-	-	-	3 titik	540.000.000	-	-	-	-	-	-	3 titik	540.000.000	DISHUB	KAB. SINTANG
		1	07	01	19	26	Pemeliharaan fasilitas kelengkapan dermaga/pelabuhan yang dipelihara	Jumlah fasilitas kelengkapan dermaga/pelabuhan yang dipelihara	-	3 alur pelayaran	60.000.000	3 alur pelayaran	60.000.000	3 alur pelayaran	60.000.000	3 alur pelayaran	60.000.000	3 alur pelayaran	60.000.000	7 unit	300.000.000	DISHUB	KAB. SINTANG
		1	07	01	19	27	Pemeliharaan alat bantu sarana navigasi lampu penerangan di dermaga/pelabuhan	Jumlah kegiatan keterlibatan dan keamanan di dermaga/pelabuhan	-	2 dermaga	80.000.000	2 dermaga	80.000.000	2 dermaga	80.000.000	2 dermaga	80.000.000	2 dermaga	80.000.000	1 dokumen	400.000.000	DISHUB	KAB. SINTANG



1	07	01	17	19	Pembinaan pelajar pelopor lalu lintas dan angkutan jalan	Jumlah peserta pelajar pelopor lalu lintas dan angkutan jalan tingkat kabupaten	25 orang	25 orang	27.879.500	25 orang	30.667.450	25 orang	33.734.195	25 orang	37.107.615	20 orang	40.818.376	120 orang	170.207.135	DISHUB	KAB. SINTANG	
1	07	01	17	25	Pengawasan terhadap kelengkapan dokumen dan sarana keselamatan kapal angkutan sungai	Jumlah kecamatan tempat pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan dokumen kapal dan sarana keselamatan kapal angkutan sungai	-	1 Keg	48.100.000	2 Keg	48.100.000	2 Keg	48.100.000	2 Keg	48.100.000	2 Keg	48.100.000	13 Kec	240.500.000	DISHUB	KAB. SINTANG	
1	07	01	17	26	Survey penetapan jaringan trayek angkutan sungai	Jumlah dokumen jaringan trayek angkutan sungai yang dihasilkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 Dok	-	DISHUB	KAB. SINTANG	
1	07	01	17	27	Pengamanan dan ketertiban di dermaga/pelabuhan	Jumlah pengawasan dan penerbitan angkutan pada hari raya Idul Fitri, Natal dan tahun Baru di pelabuhan/dermaga.	-	2 Keg	8.000.000	2 Keg	8.000.000	2 Keg	8.000.000	2 Keg	8.000.000	2 Keg	8.000.000	3 Keg	40.000.000	DISHUB	KAB. SINTANG	
1	07	01	19		Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Tingkat ketertiban arus lalu lintas, keamanan dan kelancaran serta terciptanya keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat pengguna jalan																
1	07	01	19	04	Pengendalian disiplin perlengkapan kendaraan di jalan	Jumlah pengawasan dan penerbitan administrasi dan kelengkapan kendaraan darat	22 kali	25 kali	38.000.000	28 kali	41.800.000	32 kali	45.980.000	35 kali	50.576.000	35 kali	55.635.800	155 kali	231.993.800	DISHUB	KAB. SINTANG	
1	07	01	19	09	Forum lalu lintas dan angkutan jalan	Jumlah bahan kebijakan bidang lalu lintas yang dihasilkan	1 dok	3 kali	25.000.000	3 kali	30.000.000	6 kali	45.000.000	6 kali	45.000.000	6 kali	50.000.000	24 dokumen	195.000.000	DISHUB	KAB. SINTANG	
1	07	01	19	23	Lomba Tertib Lalu Lintas (Wahana Tata Negara)	Jumlah kegiatan yang diikuti	-	1 Keg	45.000.000	1 Keg	49.500.000	1 kegiatan	54.450.000	1 Keg	59.895.000	1 Keg	65.884.500	3 Keg	274.729.500	KAB. SINTANG	KAB. SINTANG	
1	07	01	19	24	Rekomendasi Teknis KKOP Bandar Udara Tebelian			1 Dok	30.000.000	1 Dok	30.000.000	1 Dok	30.000.000	1 Dok	30.000.000	1 Dok	30.000.000		150.000.000	DISHUB	KAB. SINTANG	
1	07	01	19	25	Pengawasan keselamatan alur pelayaran sungai dan danau	Jumlah alur sungai yang dilakukan pengawasan pelayaran	-	4 kali	30.000.000	4 kali	30.000.000	4 kali	30.000.000	4 kali	30.000.000	4 kali	30.000.000	12 alur pelayaran	150.000.000	DISHUB	KAB. SINTANG	
1	07	01	19	28	Pemetaan alur pelayaran sungai kabupaten	Jumlah data topografi dan hidrografi alur pelayaran sungai kabupaten yang tersedia	-	-	-	3 sungai	475.000.000	-	-	-	-	-	-	3 sungai	475.000.000	DISHUB	KAB. SINTANG	
JUMLAH										24.345.777.305		19.641.361.170		16.352.402.364		16.564.255.505		13.856.216.864		78.920.917.707		



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINTANG

Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 yang merupakan suatu keselarasan rencana pembangunan sesuai kurun waktu yang telah ditetapkan. Adapun keselarasan tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

- Misi 3 RPJMD : Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah.
- Tujuan RPJMD : Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur
- Sasaran : Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang



Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program dan prioritas dalam mewujudkan visi dan misi Bupati Sintang Periode 2016-2021, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai acuan pengukuran keberhasilan pelaksanaan program prioritas yang ada. Adapun maksud penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini agar pelaksanaan kegiatan yang ada dapat dilaksanakan tepat sasaran, serta dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 terkait dengan RPJMD Kabupaten Sintang periode 2016-2021, yang mengacu pada tujuan dan sasaran jangka menengah adalah sebagai berikut :



TABEL 7.1
INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2016-2021

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Capaian Setiap tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi	1. Tersedianya infrastruktur/sarana dan prasarana transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang	1. Jumlah arus penumpang angkutan umum darat	Orang	537.511	559.227	570.411	581.820	593.456	593.456
			2. Jumlah arus penumpang angkutan umum sungai dan danau	Orang	323.280	323.280	323.280	323.280	323.280	323.280
			3. Jumlah Armada kapal angkutan umum sungai dan danau	Kapal	199	199	199	199	199	199
			4. Jumlah angkutan umum darat	Unit	359	361	365	368	370	370
			5. Jumlah pelabuhan laut/Udara/Terminal Bis							
			- Pelabuhan Sungai	Unit	3	3	3	3	3	3
			- Pelabuhan Udara	Unit	2	2	2	2	2	2
- Terminal Bis	Unit	5	5	5	5	5	5			



2.	Menurunnya jumlah kecelakaan transportasi	1. Tersedianya Fasilitas perlengkapan rambu-rambu lalu lintas	1. Rasio Pemasangan rambu-rambu	%	65,76	78,44	85,01	90,10	95	95
		2. Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum dan kapal yang beroperasi dalam Kabupaten Sintang	1. Jumlah izin trayek angkutan darat	Trayek	72	73	74	74	75	75
			2. Jumlah izin trayek angkutan umum sungai dan danau yang beroperasi	Trayek	20	20	20	20	20	20
			3. Jumlah Uji KIR angkutan umum	Unit	88	92	96	100	104	104
			4. Kepemilikan KIR angkutan umum	%	37	39	40	41	43	43



BAB VIII

PENUTUP

Perencanaan Strategis yang merupakan suatu proses yang mengarahkan para pemimpin SKPD dalam mengembangkan Visi merupakan acuan dasar untuk mengembangkan program, kegiatan dan kebijakan. Dengan demikian, perencanaan strategis bagi Dinas Perhubungan merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul pada Dinas Perhubungan.

Meningkatnya tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang untuk mempersiapkan diri agar eksis dan berhasil dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan senantiasa mengupayakan perubahan-perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus di susun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkesinambungan sehingga dapat menyajikan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil atau manfaat.

Untuk mencapai hasil yang diharapkan Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang menerapkan manajemen Strategik sebagai langkah awal dalam menentukan strategi kedepan tentang apa yang akan dilaksanakan, bagaimana melaksanakannya serta evaluasi, untuk itu Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang memiliki Misi, Visi,



Tujuan dan Sasaran yang dapat memudahkan bagi setiap orang untuk membaca, memahami dan mengerti apa yang di inginkan dan akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang.

Dalam perjalanan waktu serta perkembangan dan perubahan kondisi baik ekonomi, sosial maupun perubahan kebijakan Pusat dan Daerah, Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang tentunya akan melakukan perubahan dan penyesuaian. Untuk itu, masukan dan saran tentunya sangat kami harapkan untuk menjadikan Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang yang lebih baik.